

## BAB 3

### KOMUNIKASI G-20 DAN PROSES PENANGANAN KRISIS FINANSIAL GLOBAL

#### 3.1. Sejarah Singkat G-20

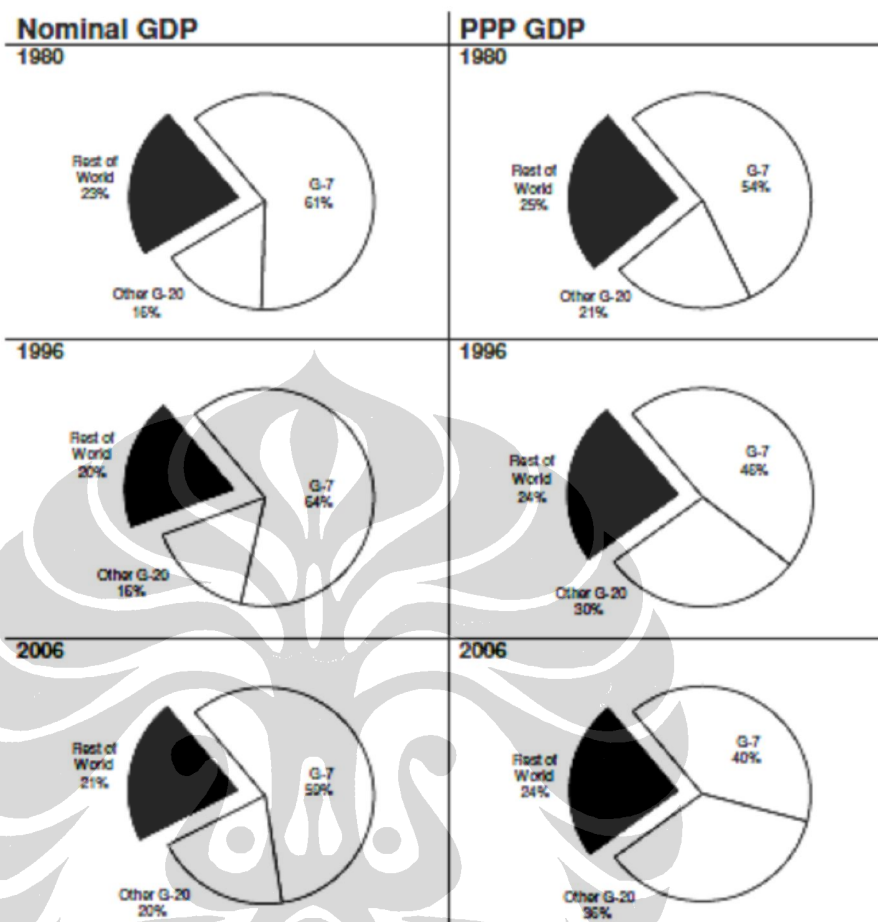
G-20 atau *The Group of Twenty* merupakan kelompok 19 negara plus Uni Eropa dengan perekonomian terbesar di dunia. Keanggotaan kelompok ini merupakan gabungan dari negara-negara maju (G-7) dan kelompok representatif negara-negara berkembang<sup>136</sup> yang pada dasarnya merupakan forum global untuk mendiskusikan isu-isu moneter internasional dengan tujuan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional.

Forum G-20 berdiri pada tahun 1999 pada momentum setelah krisis moneter menimpa negara-negara Asia. Forum ini terbentuk dari keinginan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-7 yang menginginkan forum diskusi yang lebih luas untuk membahas isu moneter internasional. Tujuannya yakni mempromosikan kerja sama global dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan menguntungkan semua pihak.<sup>137</sup> Dari sudut pandang negara-negara industri maju, negara-negara berkembang telah menunjukkan bahwa situasi ekonomi dan politik negaranya telah banyak berubah dari waktu ke waktu, dan memunculkan pandangan bahwa negara-negara berkembang merupakan sumber pertumbuhan bagi perekonomian global. Hal itu tidak lepas kaitannya dari pesatnya pertumbuhan perdagangan global yang kemudian mendorong meningkatnya harga komoditi dan bahan baku yang sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang dalam jangka waktu yang singkat. Indikator pergeseran sumber pertumbuhan tersebut dapat kita cermati dari gambar di bawah ini yang mencerminkan perbandingan *Power Purchase Parity* / PPP dan GDP kelompok negara-negara dunia:

<sup>136</sup> Sebagian besar negara anggota G-20 adalah negara-negara dengan *Purchasing Power Parity* (PPP) terbesar dengan sedikit modifikasi. Belanda, Polandia, dan Spanyol masuk ke dalam representasi Uni Eropa, sementara Iran dan Taiwan tidak diikutsertakan. Thailand dari wilayah Asia Tenggara juga tidak diikutsertakan meski memiliki PPP di atas Afrika Selatan. Beberapa pertimbangan seperti signifikansi suatu negara secara sistemis terhadap perekonomian global (*systematically important to global economy*) dan keefektifan diskusi kelompok kecil G-20 menjadi dasar bagi demografis keanggotaan G-20, lih. G-20 official publications, *The Group of Twenty: A History*, h. 20.

<sup>137</sup> "to broaden the dialogue on key economic and financial policy issues among systemically significant economies and promote co-operation to achieve stable and sustainable world economic growth that benefits all." *Ibid.*, 5.

**Gambar 7**  
**Komposisi GDP Global dan PPP Dunia antara 1980-2006**



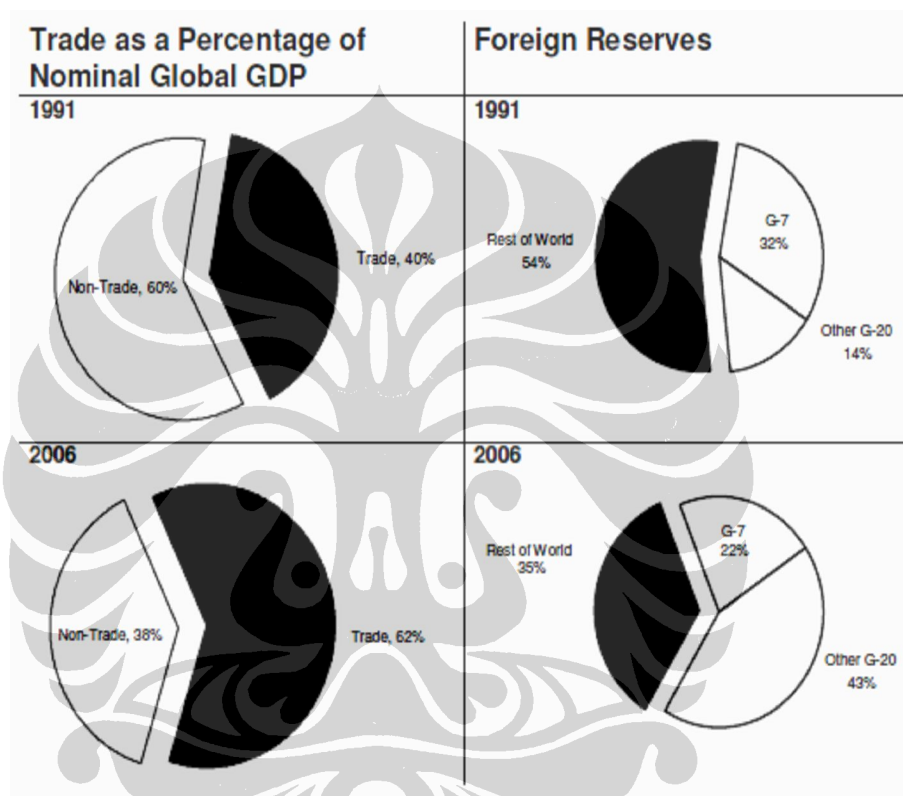
**Sumber:** IMF, *International Statistics*, Mei 2007.

Keterangan: PPP merupakan sebuah konsep di mana dollar dinilai ekuivalen (sebanding) dengan sejumlah barang di semua wilayah ekonomi dunia. PPP dihitung dengan penyesuaian terhadap kurs untuk menaikkan atau menurunkan nilai relatif suatu mata uang untuk mencari ekuilibrium *purchasing power*-nya. Dasar penghitungannya menggunakan US Dollar.

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat kita cermati bahwa posisi dominan G-7 terhadap perekonomian global pada dekade 1980-an semakin bergeser dari waktu ke waktu (dekade 1990-an dan dekade 2000-an). Pada era 1980-an, posisi GDP global dan porsi PPP negara-negara mutlak (di atas 50%) didominasi oleh G-7. Kecenderungan itu bergeser pada dekade 2000-an di mana separuh GDP global tetap berada di G-7 dan PPP negara-negara berkembang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara itu, di sisi yang lain sistem keuangan global sudah semakin terintegrasi, dan deretan panjang siklus krisis finansial belum berhenti memakan korban. Hal ini kemudian memunculkan semacam kesadaran (*awareness*), terutama yang dimulai dari G-7 tentang perlunya memperkuat kerja sama global

dengan praktik penggunaan *power* atas institusi internasional yang mereka kontrol.<sup>138</sup> Gambaran lain tentang *shifting economies* yang tercermin dalam G-20 juga dapat kita amati melalui perbandingan tingkat perdagangan global dan tingkat cadangan mata uang asing negara-negara dunia di bawah ini:

**Gambar 8**  
**Perbandingan Komposisi Perdagangan Global terhadap GDP dan Komposisi Cadangan Asing**



Sumber untuk data perdagangan global: WTO, *World Trade Organization online database*

Sumber untuk data *foreign reserve*: IMF, *International Financial Statistics*, Mei 2007

Keterangan: “*reserve*” atau cadangan didefinisikan sebagai cadangan bank sentral suatu negara dalam bentuk US Dollar, tidak termasuk cadangan emas.

Dari kedua ilustrasi di atas dapat kita simpulkan bahwa negara-negara berkembang (dalam kerangka G-20) memiliki peran yang semakin signifikan bagi perekonomian dunia sehingga tidak heran jika G-20 dianggap sebagai merupakan forum global yang penting bagi pembahasan isu-isu global, terutama kerja sama *ad hoc*.

<sup>138</sup> Tony Porter, *The G-7, the Financial Stability Forum, the G-20, and the Politics of International Financial Regulation*, 2000, h. 1.

Jika dibandingkan dengan institusionalisasi layaknya rezim-rezim internasional lain seperti PBB, forum G-20 tidak memiliki staf dan sekretariat tetap. Dalam banyak aspek, G-20 merupakan model baru dari G-7 di mana dalam kelompok itu tersedia forum informal bagi para anggotanya untuk berdebat. Tanpa adanya piagam atau keputusan-keputusan yang bersifat mengikat secara hukum, negara-negara G-20 berinteraksi secara sepadan. Penekanan forum lebih ditujukan pada mencapai consensus terkait isu-isu penting, dan semua anggotanya didorong untuk berdebat secara bebas, ketimbang beretorika berdasarkan teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Forum ini juga tidak memiliki sekretariat dan staf permanen, layanan kesekretariatan disediakan oleh negara yang menjabat sebagai ketua tahun berjalan.

Kursi ketua G-20 sangat unik karena dirotasi berdasarkan anggota-anggotanya, dan dipegang oleh “Troika” yang beranggotakan tiga anggota, yaitu ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikutnya. Sistem inovatif yang diciptakan pada tahun 2002 ini diharapkan dapat menjamin keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan organisasinya. Tugas Troika tersebut, antara lain seperti memilih pembicara dalam forum konsultasi dengan para anggotanya dan mengurus masalah logistik setiap pertemuan/konferensi. Keunikan Troika menyediakan kesempatan bagi ketua berjalan dan ketua tahun berikutnya dalam mempelajari pengalaman ketua tahun lalu ketika masih menjabat. Hal tersebut sangat signifikan contohnya ketika kursi ketua berasal dari negara maju (Kanada) pada tahun 2002 beralih ke negara berkembang (India). Pertemuan perdana G-20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah menteri keuangan Jerman dan Kanada. Putaran tahunan G-20 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1999: Berlin, Jerman
- 2000: Montreal, Kanada
- 2001: Ottawa, Kanada
- 2002: Delhi, India
- 2003: Morelia, Meksiko
- 2004: Berlin, Jerman
- 2005: Beijing, Cina
- 2006: Melbourne, Australia
- 2007: Cape Town, Afrika Selatan
- 2008: São Paulo, Brazil, 18 November
- 2008: Washington D.C., Amerika Serikat (pertemuan Kepala Pemerintahan)
- 2009: London, Inggris, 18 Maret (ditambah pertemuan Kepala Pemerintahan pada tanggal 2 April 2009)
- 2010: Nairobi, Kenya

- 2011: Selandia Baru
- 2012: Britania Raya
- 2013: Jakarta, Indonesia

Sesi *roundings* G-20 utamanya memiliki kategori yang sama dengan G-7, yaitu pertemuan deputy setidaknya dua kali setahun untuk menyiapkan pertemuan tahunan antara para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20. Semua *workshop* dan seminar para deputy G-20 juga diselenggarakan pada agenda tahunan, biasanya tiga kali setahun dan diselenggarakan oleh negara lain di luar negara ketua tahun berjalan. Contohnya pada tahun 2007 tiga workshop diselenggarakan – yang pertama di Rio de Janeiro, Brazil yang membahas tentang reformasi institusi Bretton Woods; yang kedua tentang Stabilitas harga komoditi dan keuangan di Washington D.C., AS; dan yang ketiga tentang elemen-elemen fiskal dalam pertumbuhan dan perkembangan di Istanbul, Turki. Para pakar dari dunia akademis dan sektor swasta diundang dalam workshop dan seminar tersebut untuk berbagi keahliannya dengan para deputy dan pejabat negara terkait, dan untuk berdebat isu-isu relevan. Baik pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, maupun pertemuan tingkat tinggi G-20, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan *framework* kerja sama yang cukup produktif, di antaranya seperti:<sup>139</sup>

1. 27 komunique dan *progress report* (tiga di antaranya adalah tiga komunique KTT G-20 terkait krisis finansial global 2008-2009); dan
2. 7 program kerja (*work programme*).

Fitur unik penting lain dari G-20 terletak pada penggunaan media internet secara ekstensif. Setiap negara ketua tahun berjalan memiliki situs *web*-nya masing-masing yang berfungsi efektif pada masa jabatannya itu. Publikasi umum G-20 tersedia bagi khalayak luas di web tersebut. Para anggota G-20 juga memiliki akses tersendiri ke web, dan dapat mengakses makalah-makalah dan materi-materi lainnya yang berkaitan dengan pertemuan internal, serta dapat menyimpan dokumen-dokumennya di web yang sama.<sup>140</sup>

<sup>139</sup> Data yang digunakan mengacu dari publikasi *online* G-20 saat ketua tahun berjalan G-20 adalah Korea (2010), lih. [http://www.g20.org/pub\\_index.aspx](http://www.g20.org/pub_index.aspx).

<sup>140</sup> G-20, *op.cit.*, h. 25.

**Gambar 9**  
**Tema Utama Program Kerja G-20 Periode 1999-2007**

| Major Theme<br><i>Chair</i>              | 1999<br><i>Canada</i> | 2000<br><i>Canada</i> | 2001<br><i>Canada</i> | 2002<br><i>India</i> | 2003<br><i>Mexico</i> | 2004<br><i>Germany</i> | 2005<br><i>China</i> | 2006<br><i>Australia</i> | 2007<br><i>SAfrica</i> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Crisis Prevention & Resolution           | X                     | X                     | X                     | X                    | X                     | X                      | -                    | -                        | -                      |
| Challenges of Globalization              | -                     | X                     | X                     | X                    | X                     | X                      | -                    | -                        | -                      |
| Combating Terror Financing               | -                     | -                     | X                     | X                    | X                     | X                      | -                    | -                        | -                      |
| Development & Aid                        | -                     | -                     | -                     | X                    | X                     | -                      | X                    | X                        | -                      |
| Financial Abuse / Financial Crime        | -                     | -                     | -                     | -                    | X                     | X                      | X                    | -                        | -                      |
| Institution Building in Financial Sector | -                     | -                     | -                     | -                    | X                     | X                      | -                    | -                        | -                      |
| Demographics                             | -                     | -                     | -                     | -                    | -                     | X                      | X                    | X                        | -                      |
| Regional Economic Integration            | -                     | -                     | -                     | -                    | -                     | X                      | -                    | -                        | -                      |
| Surveillance / Domestic Policies         | -                     | -                     | -                     | -                    | -                     | X                      | X                    | X                        | X                      |
| BWI Reform                               | -                     | -                     | -                     | -                    | -                     | -                      | X                    | X                        | X                      |
| Commodities & Economic Impact            | -                     | -                     | -                     | -                    | -                     | -                      | -                    | X                        | X                      |
| Fiscal Policies                          | -                     | -                     | -                     | -                    | -                     | -                      | -                    | -                        | X                      |

Sumber: G-20, *op.cit.*, h. 41.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa isu finansial merupakan tema utama yang menjadi pokok pembahasan dalam program kerja G-20. Isu-isu transnasional lain seputar *money laundering*, terorisme, regionalism, hingga bantuan kemanusiaan juga tampak menjadi perhatian G-20.

Selain pertemuan para pejabat keuangan dan para pakar itu dengan program kerja seperti yang dipaparkan di atas, pertemuan luar biasa (KTT) G-20 juga mengambil peran yang signifikan bagi dinamika forum. Hingga sejauh ini, seperti yang bisa kita amati bahwa telah terjadi tiga kali KTT G-20 yang dihadiri oleh para pemimpin negara berhubung respons terhadap krisis finansial global. KTT tersebut kemudian menghasilkan tiga komunique yang menjadi landasan/pedoman internasional dalam kerja sama penanganan krisis finansial global 2008-2009. Inilah yang menjadi pembahasan selanjutnya dalam bab ini.

### 3.2. Dinamika dalam G-20

Pada 25 September 1999, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-7 mengumumkan bahwa mereka mengajukan “perluasan dialog dalam isu-isu kunci ekonomi

dan keuangan di antara entitas ekonomi yang secara sistemis signifikan dan mempromosikan pencapaian pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan berkesinambungan, serta menguntungkan semua pihak”.<sup>141</sup> Mereka kemudian mengundang mitra-mitra entitas ekonomi tersebut (delegasi negara-negara lain) dalam sebuah pertemuan di Berlin pada bulan Desember 1999. Dalam mekanisme itu, mereka bekerja sama untuk menciptakan sebuah mekanisme dialog informal di antara para entitas yang secara sistemis signifikan tersebut di bawah payung sistem Bretton Woods. Di situ lahirlah apa yang kita ketahui sebagai G-20 sekarang. Selain 20 negara dan kelompok regionalisme (Uni Eropa) yang menjadi anggota resminya, *roundings* dalam G-20 juga mencakup keanggotaan Managing Director IMF dan presiden World Bank, serta para pejabat International Monetary and Financial Committee (IMFC) dan Development Committee (DC), termasuk para menteri keuangan dan gubernur bank sentral *ex officio*.<sup>142</sup>

Dipandang dari perspektif ekonomi-politik internasional, G-20 mencakup tiga entitas ekonomi yang berbeda. Entitas pertama yakni kelompok negara-negara maju (G-7) atau *advanced countries*, *emerging markets* seperti Brazil, India, Rusia, dan China (BRIC), dan kelompok negara-negara berkembang atau *developing countries* seperti Indonesia, Afrika Selatan, Argentina, Meksiko, dan lain-lain. Komposisi entitas ekonomi dalam G-20 memberikan warna tersendiri dalam proses pencapaian konsensus dan dinamika ekonomi-politik internasional di dalamnya. Contoh pertama dapat kita simak dari kekuatan *emerging markets* yang merupakan sumber utama dari pertumbuhan kapital transnasional (*fundamental source of growth*) pada satu dekade belakangan ini, khususnya China.<sup>143</sup> Hal itu memberikan *leverage* yang lebih bagi *emerging markets* (dalam konteks ini China) dalam proses politik di G-20, contohnya di mana China mendapatkan suara dan hak yang lebih dalam institusi keuangan global seperti IMF (gambar 10). Implikasi konkretnya, tentu saja ini berarti bahwa China mampu untuk ‘mem-veto’ proposal *old hegemon* (G-7 misalnya) yang selama ini selalu mendominasi politik dunia, ataupun mengarahkan orientasi agenda kerja G-20 sesuai kepentingannya. Dalam kubu negara-negara maju sendiri, perbedaan pandangan tentang penanganan krisis finansial juga terjadi. AS dan Inggris cenderung menginginkan agar

<sup>141</sup> “to broaden the dialogue on key economic and financial policy issues among systemically significant economies and promote co-operation to achieve stable and sustainable world economic growth that benefits all.”

<sup>142</sup> *Holding a position or membership due to the power or influence of one's office, and not by election or appointment.*

<sup>143</sup> Hingga Februari 2010, China memiliki cadangan *foreign reserve* terbesar di dunia, yaitu sebesar US\$ 2,4 triliun atau 30,7% dari total cadangan asing dunia, lih. [http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-02/20/content\\_9477391.htm](http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-02/20/content_9477391.htm), diakses pada tanggal 20 Maret 2010.

bertahan dengan *status quo* (Washington Consensus), sementara Jerman dan Perancis menginginkan peran negara yang lebih dominan terhadap sektor perekonomian dan regulasi sektor finansial yang lebih ketat. Hasilnya, pergeseran dominasi Anglo-Saxon (AS-Inggris) atas politik dunia tampak semakin nyata.<sup>144</sup>

Dinamika kelompok-kelompok entitas ekonomi tersebut juga tercermin melalui kebutuhan masyarakat internasional akan rezim keuangan global baru yang lebih efektif dan *accountable*. Salah satunya seperti yang digagas Joseph Stiglitz bersama tim ahlinya melalui UN Commission of Financial Experts. Menurut mereka, rezim-rezim seperti FSB yang merupakan perluasan dari FSF idealnya tidak hanya diperluas secara keanggotaannya, melainkan juga mencerminkan representasi, kondisi, dan kebutuhan negara-negara berkembang. Kebanyakan suara *developing countries* belum sepenuhnya terwakilkan dalam *standard-setting institutions* dewasa ini. Contohnya, Basel Committee of Banking for International Settlements yang menyediakan *data disseminations*, pengawasan bank, regulasi keuangan, dan pemerintahan korporasi (*corporate governance*) bagi sektor perekonomian (finansial) internasional. Kurangnya representasi negara-negara berkembang dalam institusi *ad hoc* ini menghasilkan analisis dan rekomendasi yang tidak lengkap dan bias bagi reformasi sektor keuangan itu sendiri, dan khususnya kebijakan negara-negara berkembang atas sektor finansial mereka.<sup>145</sup> Dinamika dan pergeseran kekuasaan (*power*) di antara elit negara-negara dunia yang telah disebutkan ini menggarisbawahi tentang perlunya perluasan dan optimalisasi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

### 3.3. Tiga Komunike KTT G-20 periode 2008 – 2009

Dalam merespons krisis finansial global yang puncaknya terjadi pada tahun 2008, forum G-20 mengeluarkan tiga komunike yang menjadi landasan bersama dalam penanganan kolektif krisis tersebut. Komunike I dideklarasikan pada KTT G-20 I pada tanggal 15 November 2008 di Washington, AS; pada 2 April 2009 di London, Inggris; dan terakhir di Pittsburgh, AS pada 25 September 2009. Pada bab ini penulis akan membahas tiga komunike tersebut satu per satu, dan relevansinya terhadap penanganan krisis finansial global. Penggunaan diksi “komunike I hingga komunike III” dalam penelitian ini mengacu pada komunike KTT G-20

<sup>144</sup> Lih. salah satu contoh beritanya di <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7980513.stm>, “Surprise Consensus at G20 Summit”, diakses pada tanggal 10 April 2010.

<sup>145</sup> Joseph E. Stiglitz, *op.cit.*, 2010, h. 137.



yang khusus memuat tentang penanganan krisis finansial global, dan tidak mengacu pada komunike-komunike G-20 lainnya yang telah dihasilkan G-20 sepanjang sejarah berdirinya.

### 3.3.1. Komunike G-20 November 2008

Komunike pertama KTT G-20 yang dideklarasikan di Washington pada 15 November 2008 terdiri atas 16 butir pasal, dan 95 komitmen. Komitmen-komitmen tersebut antara lain tersebar dalam:

Declaration on the Summit on Financial Markets and the World Economy (39 komitmen)

- Actions Taken and to Be Taken
- Common Principles for Reform of Financial Markets
- Tasking of Ministers and Experts
- Commitment to an Open Global Economy

Action Plan to Implement Principles for Reform (56 komitmen)

- Strengthening Transparency and Accountability
- Enhancing Sound Regulation
- Prudential Oversight
- Risk Management
- Promoting Integrity in Financial Markets
- Reinforcing International Cooperation
- Reforming International Financial Institutions

Komunike pertama mencakup beberapa poin penting terkait krisis finansial global, yaitu:

#### 1. Identifikasi akar / penyebab krisis finansial global

G-20 mendeklarasikan bersama tentang dua hal penting terkait penyebab krisis. Pertama, kegagalan dalam pasar finansial yang disebabkan oleh ketidakseimbangan penerbitan aset-aset derivatif; dan kedua, pihak otoritas di beberapa negara maju lalai dalam pengawasan dan pengaturan pasar finansial dan/atau berada dalam langkah yang tertinggal dengan cepatnya inovasi produk-produk finansial. Ini tercermin dari pasal ketiga komunike I tersebut:

*“During period of strong global growth, growing capital flows, and prolonged stability earlier this decade, market participants sought higher yields without an adequate appreciation of the risks and failed to exercise proper due diligence. At the same time, weak underwriting standards, unsound risk management practices, increasingly complex and opaque financial products, and consequent excessive leverage combined to create vulnerabilities in the system. Policy-makers, regulators and supervisors,*

*in some advanced countries, did not adequately appreciate and address the risk building up in financial markets, keep pace with financial innovation, or take into account the systemic ramifications of domestic regulatory actions.”*

2. Rencana aksi kolektif negara-negara anggota G-20 terhadap penanganan krisis

Negara-negara anggota G-20 sepakat untuk menstimulasi perekonomiannya masing-masing, menyediakan likuiditas dana yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi, memperkuat modal institusi keuangan, melindungi tabungan dan deposito nasional, mencairkan pasar kredit, dan bekerja sama dalam memperkuat institusi keuangan internasional / *international financial institutions* (IFI) yang dapat menyediakan dukungan bagi perekonomian global. Poin ini tercermin dari pasal keempat komunikasi I G-20, yaitu:

*“We have taken strong and significant actions to date to stimulate our economies, provide liquidity, strengthen the capital of financial institutions, protect savings and deposits, address regulatory deficiencies, unfreeze credit markets, and are working to ensure that international financial institutions (IFIs) can provide critical support for the global economy.”*

Selain itu, G-20 juga sepakat untuk bekerja sama secara global dalam hal kebijakan (regulasi), makroekonomi, pemulihan pertumbuhan ekonomi, dan mendukung perekonomian negara-negara berkembang. Hal tersebut tertuang dalam pasal ketujuh komunikasi I G-20, yaitu:

*“... we agreed that a broader policy response is needed, based on closer macroeconomic cooperation, to restore growth, avoid negative spillovers and support emerging market economic and developing countries.”*

3. Tugas para menteri negara anggota dan pakar keuangan

Seperti yang dijabarkan dalam *G-20 Action Plan* terhadap lima prinsip reformasi, tugas para menteri keuangan negara-negara anggota adalah mengimplementasikan program negara masing-masing berdasarkan instruksi *Action Plan* dan menetapkan penetapan waktu (*timeline*) atas pelaksanaan program tersebut. Para menteri keuangan juga bekerja sama dengan institusi atau badan-badan lain, antara lain IFI dan pasar keuangan.

4. Komitmen bersama terhadap ekonomi global yang terbuka

G-20 tetap berpandangan bahwa reformasi yang berlangsung akan sukses jika semua pihak tetap bepegang pada prinsip pasar bebas, kepastian hukum, penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Haki), perdagangan dan investasi yang terbuka,

pasar yang kompetitif dan efisien, dan sistem keuangan yang diatur secara efektif. Poin-poin tersebut tertuang dalam pasal kedua belas komunike I G-20, yakni:

*“We recognize that these reforms will only be successful if grounded in a commitment to free market principles, including the rule of law, respect for private property, open trade and investment, competitive markets, and efficient, effectively regulated financial systems. These principles are essential to economic growth and prosperity and have lifted millions out of poverty, and have significantly raised the global standard of living. Recognizing the necessity to improve financial sector regulation, we must avoid over-regulation that would hamper economic growth and exacerbate the contraction of capital flows, including to developing countries.”*

Pada poin selanjutnya, yaitu butir ketiga belas, G-20 juga menggarisbawahi sikap mereka terhadap proteksionisme, yaitu:

*“We underscore the critical importance of rejecting protectionism and not turning inward in times of financial uncertainty. In this regard, within the next 12 months, we will refrain from raising new barriers to investment or to trade in goods and services, imposing new export restrictions, or implementing World Trade Organization (WTO) inconsistent measures to stimulate exports. Further, we shall strive to reach agreement this year on modalities that leads to a successful conclusion to the WTO’s Doha Development Agenda with an ambitious and balanced outcome. We instruct our Trade Ministers to achieve this objective and stand ready to assist directly, as necessary. We also agree that our countries have the largest stake in the global trading system and therefore each must make the positive contributions necessary to achieve such an outcome.”*

Komunike pertama G-20 itu secara substantif memuat lima prinsip utama terkait penanganan krisis finansial global, antara lain:<sup>146</sup>

1. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas (*strengthening transparency and accountability*);
2. Memperkuat regulasi terpadu (*enhancing sound regulation*);
3. Mempromosikan integritas dalam pasar finansial (*promoting integrity in financial markets*);
4. Mempererat kerja sama internasional (*reinforcing international cooperation*); dan
5. Mereformasi institusi finansial internasional (*reforming international financial institutions*).

<sup>146</sup> Komunike G-20 November 2008 pasal 9, h. 3.

Kelima prinsip ini kemudian dijabarkan rencana implementasinya secara mendetail dalam bagian “*Action Plan*” Komunique pertama. *Action Plan* yang dirumuskan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ini berangkat dari kelima prinsip di atas, dan disusun berjangka waktu pendek (*immediate actions*) tertanggal mulai 31 Maret 2009; dan berjangka waktu menengah yang melibatkan peran banyak institusi keuangan internasional dalam konsep kerja sama multilateral.

Komunique I ini juga memuat satu hal penting terkait kerja sama finansial internasional dalam bentuk institusionalisasi, yaitu pencetusan perluasan lembaga Financial Stability Forum (FSF) yang dulu dibentuk pada tahun 1999 oleh kelompok G-7. Hal itu tercermin dari pasal kesembilan butir keempat komunique:

*“Reforming International Financial Institutions: We are committed to advancing the reform of the Bretton Woods institutions so that they can more adequately reflect changing economic weights in the world economy order... emerging and developing, including the poorest countries, should have greater voice and representation. The Financial Stability Forum must expand urgently to a broader membership of emerging economies, and other major standard setting bodies should promptly review their membership...”*

Sebagai kesimpulan, komunique I G-20 komunique secara substansial menyentuh lima prinsip bersama terkait kerja sama penanganan krisis finansial dan keinginan G-20 untuk memperluas keanggotaan FSF dengan partisipasi negara-negara berkembang di dalamnya.

### 3.3.2. Komunique G-20 April 2009

Komunique KTT kedua G-20 tentang krisis finansial global yang dideklarasikan di London, Inggris memuat total sebanyak 29 butir pasal dan 88 komitmen. Komitmen-komitmen tersebut antara lain tersebar dalam:

- Restoring growth and jobs
- Strengthening financial supervision and regulation
- Strengthening our global financial institutions
- Resisting protectionism and promoting global trade and investment
- Ensuring a fair and sustainable recovery for all
- Delivering our commitments

Tujuan utama kerja sama G-20 yang dikemukakan berdasarkan komunike II tersebut ada enam, yaitu:<sup>147</sup>

1. Memulihkan kepercayaan pasar (*trust*), pertumbuhan ekonomi, dan lapangan pekerjaan;
2. Memperbaiki sistem keuangan untuk memulihkan kredit/pinjaman;
3. Memperkuat regulasi keuangan untuk membangun kembali kepercayaan pasar;
4. Mendanai dan mereformasi institusi keuangan internasional demi mengatasi krisis, dan mencegahnya terulang kembali pada masa-masa mendatang;
5. Mempromosikan perdagangan dan investasi global, dan menolak proteksionisme yang menghalangi kemakmuran; dan
6. Membangun pemulihan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Dalam komunike yang sama, negara-negara anggota G-20 sepakat untuk menggalang dana pinjaman sebesar US\$ 750 milyar untuk disalurkan melalui IMF, alokasi SDR baru sebesar US\$ 250 milyar, dan menggalang tambahan dana pinjaman untuk disalurkan pada Multilateral Development Banks (MDBs).

Selain itu, KTT ini juga merupakan momen lahirnya Financial Stability Board (FSB). Dalam komunike II, perihal pendirian FSB tertuang pada pasal kelima belas dan keenam belas, yaitu:

15. *“To this end we are implementing the Action Plan agreed at our last meeting, as set out in the attached progress report. We have today also issued a Declaration, Strengthening the Financial System. In particular we agree:*

- *To establish a new Financial Stability Board (FSB) with a strengthened mandate, as a successor to the Financial Stability Forum (FSF), including all G-20 countries, FSF members, Spain, and the European Commissions;*
- *That the FSB should collaborate with the IMF to provide early warning of macroeconomic and financial risks and the action needed to address them;*
- *To reshape our regulatory systems so that our authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks;*

<sup>147</sup> Komunike G-20 April 2009, pasal 4, h. 1.

- *To extend regulation and oversight to all systematically important financial institutions, instruments and markets. This will include, for the first time, systematically important hedge funds; ...”*

16. *“We instruct our Finance Ministers to complete the implementation of these decisions in line with the timetable set out in the Action Plan. We have asked the FSB and the IMF to monitor progress, working with the Financial Action Taskforce and other relevant bodies, and to provide a report to the next meeting of our Finance Ministers in Scotland in November.”*

FSB merupakan perluasan dari institusi Financial Stability Forum (FSF) yang dibentuk pada tahun 1999. FSF didirikan oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-7 atas rekomendasi Hans Tietmeyer, Presiden Deutsche Bundesbank. Perluasan FSF yang dimaksud sebelumnya dalam bentuk anggota (kini beranggotakan juga menteri keuangan negara-negara berkembang dalam G-20) dan dalam hal mandat. FSB memiliki tujuan ambisius menyatukan anggota-anggotanya dalam mengidentifikasi ancaman krisis dan mengembangkan pengawasan dan pengaturan (regulasi dan kebijakan nasional) pasar demi tercapainya stabilitas pasar finansial. Poin mendetail tentang FSB dalam kerja sama penanganan krisis finansial global akan dibahas pada subbab terpisah dalam penelitian ini.

Sebagai kesimpulan, komunike kedua secara substansial memuat tentang peningkatan alokasi kapital ke rezim keuangan internasional seperti IMF dan World Bank yang dicanangkan melalui kesepakatan New Arrangement Borrowing (NAB). Selain itu, komunike ini juga merupakan penegasan kembali dari komitmen pencegahan proteksionisme yang dikemukakan pada komunike Washington sebelumnya, sekaligus pernyataan sikap G-20 tentang krisis multidimensi yang timbul akibat krisis finansial global. Krisis multidimensi tersebut seperti isu perubahan iklim dan jaminan terhadap keberlangsungan program bantuan ke negara-negara miskin (Millenium Development Goals/MDGs).

### **3.3.3. Komunike G-20 September 2009**

Komunike ketiga G-20 tentang krisis finansial global yang dideklarasikan di Pittsburgh, AS memuat total sebanyak 81 butir pasal dan 107 komitmen. Komitmen-komitmen tersebut antara lain tersebar dalam:

- Preamble
- A Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth
- Strengthening the International Financial Regulatory System
- Modernizing Our Global Institutions to Reflect Today's Global Economy
- Reforming the Mandate, Mission and Governance of the IMF
- Reforming the Mission, Mandate and Governance of Our Development Banks
- Energy Security and Climate Change
- Strengthening Support for the Most Vulnerable
- Putting Quality Jobs at the Heart of the Recovery
- An Open Global Economy
- The Path from Pittsburgh

Secara substantif, komunike III tersebut merupakan ulasan (*review*) atas kedua komunike sebelumnya. Hal tersebut dapat diamati dari butir-butir pembukaan komunike, yaitu pasal pertama hingga pasal kesebelas, contohnya:

7. *“Today, we reviewed the progress we have made since the London Summit in April. Our national commitments to restore growth resulted in the largest and most coordinated fiscal and monetary stimulus ever undertaken. We acted together to increase dramatically the resources necessary to stop the crisis from spreading around the world. We took steps to fix the broken regulatory system and started to implement sweeping reforms to reduce the risk that financial excesses will again destabilize the global economy.”*

11. *“Even as the work of recovery continues, we pledge to adopt the policies needed to lay the foundation for strong, sustained and balanced growth in the 21<sup>st</sup> century. We recognize that we have to act forcefully to overcome the legacy of the recent, severe global economic crisis and to help people cope with the consequences of this crisis. We want growth without cycles of boom and bust and markets that foster responsibility not recklessness.”*

Kerangka kerja sama baru dicetuskan dalam komunike ini, yaitu *Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth*. Ini dapat dilihat dari bagian pertama pasal ke-13 dari komunike ini:

*“13. To launch a framework that lays out the policies and the way we act together to generate strong, sustainable and balanced growth. We need a durable recovery that creates the good jobs our people need.”*

Pada pasal lain juga terdapat komitmen yang sama terhadap *framework* baru itu:

*“15. Our Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth is a compact that commits us to work together to asses how our policies fit together, to evaluate whether they are collectively consistent with more sustainable and balanced growth, and to act as necessary to meet our common objectives.”*

*Framework* tersebut kemudian menjadi bagian kedua dalam komunike London ini yang memuat komitmen-komitmen teknis, seperti:

1. Piagam FSB yang telah disusun dan kewajibannya dalam menjalankan *monitoring process* dan *assessment report* kepada pertemuan tahunan para menkeu dan gubernur bank sentral G-20 terkait implementasi regulasi dan kebijakan sektor keuangan yang telah diterapkan;

Bagian kedua komunike, pasal 11.

2. Komitmen untuk menerapkan konvensi Basel II dengan kriteria yang lebih ketat pada akhir 2010, terutama dalam hal cadangan kapital yang lebih besar dan aturan-aturan *leverage / risk* dalam dunia perbankan;

Bagian kedua komunike, pasal 13.

3. Mengoptimalkan peran lembaga keuangan lain seperti the International Accounting Standards Board's (IASB), hingga Financial Action Task Force (FATF);

Bagian kedua komunike, pasal 14 dan 15.

4. Penambahan NAB sebesar US\$ 500 miliar dan penambahan alokasi SDR menjadi total US\$ 283 miliar di mana US\$ 100 miliar ditujukan untuk mendukung pasar negara-negara berkembang;

Bagian kedua komunike, pasal 19.

5. Komitmen pemberdayaan MDB dan World Bank terhadap ketahanan pangan dan teknologi/industri yang lebih ramah lingkungan. Rencana reformasi voting power WB setidaknya 3% bagi negara-negara berkembang dengan tanggal jatuh tempo kuartal keempat tahun 2010;

Bagian kedua komunike, pasal 22 – 27.

6. Komitmen terhadap keamanan energi dan perubahan iklim;

Bagian kedua komunike, pasal 28 – 33.



7. Komitmen perlindungan terhadap *Low Income Countries* (LICs) melalui kontribusi MDB;

Bagian kedua komunike, pasal 34 – 42.

8. Perlindungan terhadap lapangan pekerjaan;

Bagian kedua komunike, pasal 43 – 47.

9. Komitmen terhadap globalisasi di mana akses pasar terbuka/bebas

Bagian kedua komunike, pasal Pasal 48 – 49.

Sebagai kesimpulan, komunike ketiga menaruh fokus pembahasannya pada pemberdayaan institusi internasional, baik dari segi alokasi kapital baru (NAB) maupun reformasi internal IMF dan WB yang sedikit lebih menguntungkan negara-negara berkembang dalam hal *voting power*. Akan tetapi, dalam komunike ini sayangnya rencana *voting power* IMF di mana negara-negara berkembang mendapat alokasi baru setidaknya 5% tidak disebutkan kapan persisnya diimplementasikan dalam komunike ini.<sup>148</sup> Poin reformasi IMF yang disebutkan dalam komunike ini hanya memuat rencana reformasi kuota, mandat, misi, dan cara pemerintahan IMF dengan pengupayaan perbaikan kredibilitas, legitimasi, dan keefektifan lembaga tersebut.

### 3.4. Peran IMF dan FSB sebagai Rezim Utama dalam Kerja sama G-20

Untuk dapat melihat korelasi penguatan atau pelemahan peran negara terhadap penanganan krisis finansial melalui forum G-20, salah satunya dengan menilik peran International Monetary Fund (IMF) dan Financial Stability Board (FSB) yang terlibat secara khusus dalam reformasi sistem finansial yang dicanangkan G-20. Terdapat tiga poin penting yang akan penulis kemukakan terkait peran kedua institusi tersebut, yaitu perihal mandat, alokasi sumber daya, dan kontribusi institusi dalam penanganan krisis.

<sup>148</sup> Bagian kedua komunike III G-20, pasal 21, "...We must *urgently* implement the package of IMF quota and voice reforms agreed in April 2008."

### 3.4.1. IMF dan Krisis Finansial Global

Berdasarkan hasil tiga komunike G-20, mandat atau tugas IMF, antara lain:

1. Menyediakan dukungan akses kapital dan program bantuan bagi negara-negara yang membutuhkannya;<sup>149</sup>
2. Berkolaborasi bersama FSB dalam mengidentifikasi ancaman krisis finansial dan mengantisipasinya;<sup>150</sup>

Untuk dapat menemukan benang merah antara komitmen G-20 dan implementasi konkretnya, terutama terhadap penguatan institusi keuangan internasional, kita dapat menilik salah satunya dengan posisi likuiditas IMF pada periode krisis, seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
***IMF's Financial Resources and Liquidity Position, 2008 – January 2010***

(In billions of SDRs unless otherwise indicated; end-of-period)

|  | 2008  | 2009  | Jan 2010 |       |
|--|-------|-------|----------|-------|
|  |       |       | SDRs     | US\$  |
| <b>I. <u>Total resources</u></b>               | 224,1 | 374,3 | 380,7    | 591,6 |
| Members' currencies                            | 209,8 | 218,5 | 218,5    | 339,6 |
| SDR holdings                                   | 2,0   | 2,5   | 2,5      | 3,8   |
| Gold holdings                                  | 5,9   | 4,4   | 4,4      | 6,9   |
| Other assets                                   | 6,5   | 6,5   | 6,5      | 10,1  |
| Available under GAB/NAB activation             | -     | -     | -        | -     |
| Other borrowing arrangements <sup>1</sup>      |       | 142,4 | 148,8    | 231,2 |
| <b>II. <u>Less: Non-usable resources</u></b>   | 71,7  | 84,2  | 84,3     | 130,9 |
| <i>Of which:</i> Credit outstanding            | 17,5  | 37,2  | 37,3     | 57,9  |
| <b>III. <u>Equals: Usable resources</u></b>    | 152,5 | 290,1 | 296,4    | 460,7 |
| <b>IV. <u>Less: Undrawn balances under</u></b> | 20,3  | 77,1  | 77,2     | 120,0 |

<sup>149</sup> Komunike I G-20 pasal 7 butir 4.

<sup>150</sup> Komunike I G-20 pasal 9 butir 5.

|  |             |              |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>GRA arrangements</u>  |             |              |              |              |
| V. <u>Equals: Uncommitted usable resources</u>                 | 132,1       | 213,0        | 219,2        | 340,6        |
| VI. <u>Plus: Repurchases one-year forward</u>                  | 0,1         | 1,5          | 1,6          | 2,4          |
| VII. <u>Less: Repayments of borrowing due one-year forward</u> | -           | -            | -            | -            |
| VIII. <u>Less: Prudential balance<sup>2</sup></u>              | 34,7        | 65,3         | 66,6         | 103,5        |
| IX. <u>Equals: One-year forward commitment capacity (FCC)</u>  | <b>97,6</b> | <b>149,3</b> | <b>154,1</b> | <b>239,5</b> |
| <u>Memorandum items:</u>                                       |             |              |              |              |
| <u>Potential GAB/NAB borrowing</u>                             | 34,0        | 34,0         | 34,0         | 52,8         |
| Quotas of members that finance IMF transactions                | 173,4       | 179,9        | 179,9        | 279,6        |
| <u>Liquid liabilities</u>                                      | 25,1        | 40,4         | 40,5         | 62,9         |
| Encashable immediately <sup>3</sup>                            | 25,1        | 38,6         | 38,7         | 60,1         |
| Encashable within 12 months <sup>4</sup>                       | -           | 1,8          | 1,8          | 2,8          |
| US\$ per SDR   | 1,54027     | 1,56769      | 1,55419      | -            |

**Sumber:** IMF, *IMF data and statistics*<sup>151</sup>

**Catatan:** beberapa detail ada yang tidak dimasukkan karena masih dalam proses atau perundingan.

1. Termasuk *borrowing arrangements* dengan Jepang (US\$ 100 milyar), Kanada (US\$ 10 milyar), Norges Bank (SDR 3 milyar), Inggris Raya (SDR 9,92 milyar), Deutsche Bundesbank (EUR 15 milyar), De Nederlandsche Bank NV (EUR 5,31 milyar), Danmarks National bank (EUR 1,95 milyar), Banco de Portugal (EUR 1,06 milyar), dan Perancis (EUR 11,06 milyar); dan *note purchase agreements* dengan People's Bank of China (SDR 32 milyar) dan Brazil (US\$10 milyar).

2. Prudential Balance merefleksikan *inclusion* dari pinjaman dana baru yang tersedia.

3. Reserve tranche positions, immediately encashable bilateral borrowing, and Series A notes.

4. Pinjaman bilateral dan Series B notes yang dapat dicairkan dan digunakan dalam jangka waktu 12 bulan.

Apa makna posisi likuiditas IMF tersebut, terutama terhadap penanganan krisis finansial? Ada dua hal signifikan jika dipandang dari kacamata ekonomi-politik internasional. Pertama, dalam situasi krisis finansial global 2008 negara menghadapi ancaman bahwa kestabilan ekonomi-politik nasional dan internasional dipengaruhi salah satunya oleh keadaan pasar / *market* (dalam konteks ini pasar finansial). Hal ini relevan dalam konteks rezim moneter internasional pascaBretton Woods dipenuhi oleh ketidakstabilan. Hengkangnya investasi kapital dari para investor (baik secara institusi/individual) secara besar-besaran yang

<sup>151</sup> <http://www.imf.org/external/np/tre/liquid/2010/0110.htm>, diakses pada tanggal 14 Mei 2010.

berawal dari ketidakpercayaan pasar terhadap negara dapat melumpuhkan aktivitas perekonomian, dan terutama kehidupan bernegara itu sendiri. Siklus “*boom and bust*”, mulai dari embargo OPEC pada awal dekade 1970-an, krisis hutang Amerika Latin, *bubble economy* di Jepang, hingga krisis finansial Asia yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan bukti-bukti empiris yang menguatkan teori tentang ketidakstabilan moneter pascaBretton Woods itu.<sup>152</sup> Kedua, dalam mengantisipasi ancaman ‘global’ tersebut maka negara-negara (G-20) kemudian meresponsnya dengan bekerja sama (atas dasar *interest*) secara global pula, yakni menguatkan institusi-institusi internasional, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan kapital G-20 dalam mengembalikan kepercayaan pasar dan menghadapi fluktuasi<sup>153</sup> yang hampir pasti terjadi.

Komitmen G-20 yang dideklarasikan melalui ketiga komunike G-20 dalam menghadapi ketidakstabilan pasar tersebut juga tercermin melalui peningkatan alokasi dana kolektif oleh negara ke institusi keuangan internasional seperti IMF, selain dari alokasi kuota masing-masing negara anggota anggota.<sup>154</sup> Hal tersebut salah satunya dapat kita amati dari program New Arrangement Borrowments (NAB). NAB bersama General Arrangement Borrowings (GAB) merupakan fasilitas kredit antara IMF dan sejumlah negara atau institusi yang digunakan untuk menangani situasi-situasi khusus yang dianggap dapat mengguncang sistem moneter internasional. Berikut pemaparan lengkap tentang NAB tersebut:

**Tabel 4**  
**Partisipan Expanded NAB dan Jumlah Kredit<sup>1</sup>**

| Partisipan saat ini    | Jumlah (dalam milyar SDR) |
|------------------------|---------------------------|
| Australia              | 4.370,41                  |
| Austria                | 3.579,24                  |
| Banco Central de Chile | 1.360,00                  |

<sup>152</sup> Krugman, *Paul, op.cit.*, terutama h. 189-191. Krugman misalnya menyebut periode kontemporer (era liberalisasi finansial) sebagai “*a new era of depression economics*” yang berangkat dari pernyataan ekonom John Keynes pada era Depresi Besar 1930-an: “*We have involved ourselves in a colossal muddle, having blundered in the control of a delicate machine, the working of which we do not understand*”.

<sup>153</sup> Fluktuasi di sini mengacu pada kelemahan sistem mengambang bebas di mana kekuatan ekonomi negara dipengaruhi (*compromised*) oleh aksi banyak individual dalam pasar, contohnya aksi spekulatif dan *short-selling* yang sangat populer salah satunya atas manuver George Soros saat krisis finansial Asia 1997.

<sup>154</sup> Setiap negara anggota IMF memiliki kuotanya masing-masing yang diukur berdasarkan kekuatan ekonomi relatifnya terhadap GDP global. Kuota tersebut mewajibkan negara untuk membayarkan sejumlah uang kepada IMF, dan juga menentukan besarnya suara anggota (*voting power*) dalam keputusan rapat-rapat IMF. Kuota juga merupakan salah satu sumber utama pendanaan IMF (the Fund).

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Belgium                      | 7.861,85  |
| Canada                       | 7.624,43  |
| Denmark                      | 3.207,78  |
| Deutsche Bundesbank          | 25.370,81 |
| Finland                      | 2.231,76  |
| France                       | 18.657,38 |
| Hong Kong Monetary Authority | 340       |
| Italy                        | 13.578,03 |
| Japan                        | 65.953,20 |
| Korea                        | 6.583,44  |
| Kuwait                       | 341,29    |
| Luxembourg                   | 970,59    |
| Malaysia                     | 340,00    |
| Netherlands                  | 9.043,72  |
| Norway                       | 3.870,94  |
| Saudi Arabia                 | 11.126,03 |
| Singapore                    | 1.276,52  |
| Spain                        | 6.702,18  |
| Sveriges Riksbank            | 4.439,74  |
| Swiss National Bank          | 10.905,42 |
| Thailand                     | 340,00    |
| United Kingdom               | 18.657,38 |
| United States                | 69.074,27 |
| <b>Partisipan baru</b>       |           |
| Bank of Israel               | 500,00    |
| Brazil                       | 8.740,82  |
| China                        | 31.217,22 |
| Cyprus                       | 340,00    |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| India                    | 8.740,82          |
| Ireland                  | 1.885,52          |
| Mexico                   | 4994,76           |
| New Zealand              | 624,34            |
| Philippines              | 340,00            |
| Portugal                 | 1.542,13          |
| Russian Federation       | 8.740,82          |
| South Africa             | 340,00            |
| <b>Total<sup>2</sup></b> | <b>367.467,36</b> |

Sumber: IMF, *IMF facts*<sup>155</sup>

Catatan:

1. *Credit arrangements* ditentukan minimum SDR 340 milyar
2. Jumlah total bisa tidak sama dengan jumlah dari tiap komponen berhubung negosiasi-negosiasi yang masih berjalan.

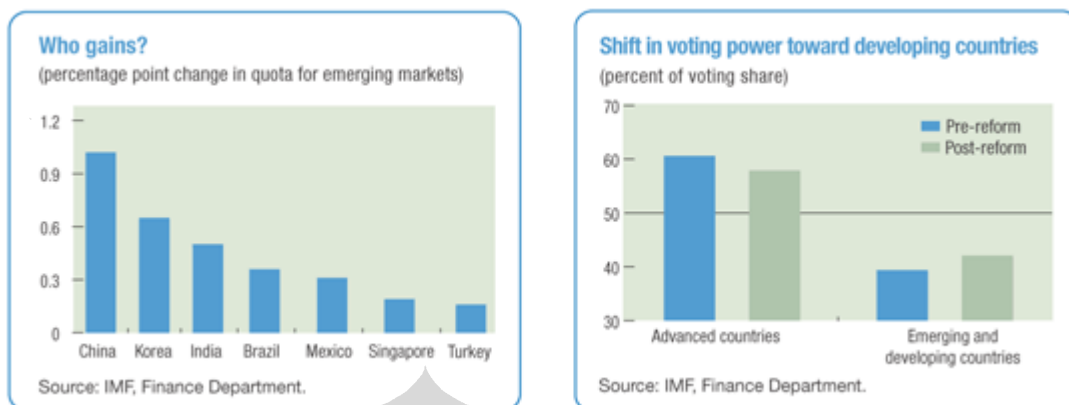
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa AS tetap berada di urutan pertama sebagai kreditor IMF. Negara-negara maju lainnya seperti Perancis, Jerman, Jepang, dan lain-lain juga tetap mendominasi NAB. Perubahan signifikan tampak dari posisi China sebagai kreditor besar yang melampaui kontribusi Inggris sekitar 70% di atasnya. Rusia, Brazil, Indiam serta Arab Saudi juga berkontribusi tidak sedikit dalam fasilitas NAB yang baru ini.

Selain peningkatan alokasi kapital kolektif tersebut, reformasi IMF sebagai institusi keuangan global juga dicanangkan oleh forum G-20. Poin ini sudah tercermin sejak komunike I G-20 di mana rencana reformasi International Financial Institution (IFI) dituangkan oleh para pemimpin G-20, salah satunya dengan reformasi kuota suara dan besarnya representasi negara-negara berkembang di IMF.

---

<sup>155</sup> <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gabnab.htm>, diakses pada tanggal 14 Mei 2010.

**Gambar 10**  
**Rencana Reformasi IMF melalui Kuota dan *Voting Power***



Sumber: IMF, *IMF Factsheet*, Mei 2010.

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat kita lihat bahwa China mendapatkan alokasi kuota terbesar di IMF. Hal tersebut tidak lepas kaitannya dengan peran China yang sangat menonjol dalam perekonomian dunia belakangan ini, baik dalam perdagangan riil maupun ekspor kapital ke negara-negara asing (lihat gambar 4, 7, dan 8). Negara-negara lain yang rencananya juga akan mendapatkan alokasi peningkatan voting adalah Korea Selatan, India, Brazil, Meksiko, Singapura, dan Turki. Penting untuk dikritisi bahwa rencana reformasi melalui voting IMF ini memang menunjukkan perubahan bagi proses *shifting power* di IMF yang terkait dengan penentuan kebijakan ekonomi internasional, namun secara keseluruhan rencana tersebut belum menunjukkan keseimbangan komposisi sempurna *voting power* antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang (58%:42% menurut skema reformasi).

### 3.4.2. FSB dan Krisis Finansial Global

Pada bulan April 2009, negara-negara anggota G-20 sepakat untuk mendirikan Financial Stability Board (FSB) sebagai suksesor atau penerus dari Financial Stability Forum (FSF) yang dibentuk sebelumnya oleh kelompok negara maju (G-7) pada tahun 1999. Perluasan FSF menjadi FSB tersebut sudah tercetus sejak semenjak dideklarasikannya komunike I G-20 di Washington, yakni ketika para pemimpin negara G-20 menyadari adanya kebutuhan untuk mereformasi institusi Bretton Woods di mana negara-negara berkembang juga berperan aktif

dalam perekonomian global, sesuai dengan kontribusinya masing-masing bagi perekonomian global secara keseluruhan.<sup>156</sup>

FSF dan FSB memiliki tujuan utama yang kurang lebih sama, yaitu sebagai forum koordinasi global yang mempromosikan regulasi sektor keuangan yang efektif, pengawasan kebijakan sektor keuangan, dan terutama stabilitas sistem keuangan internasional. Mandat FSB, yaitu:

1. Menilai titik lemah yang dapat memengaruhi sistem keuangan, mengidentifikasinya, dan mengawasi jalannya tindakan penanganan;
2. Mempromosikan koordinasi dan pertukaran informasi di antara otoritas-otoritas terkait demi tercapainya stabilitas sistem keuangan;
3. Memonitor dan memberi saran tentang perkembangan pasar beserta implikasinya dari kebijakan regulasi yang diterapkan;
4. Memberi saran dan memonitor praktik terbaik (*best practices*) dalam rangka mencapai regulasi yang standar;
5. Menjalankan *joint strategic review* dari perkembangan kebijakan internasional yang standar agar usaha tersebut dapat dijalankan pada waktunya, terkoordinasi, berfokus pada prioritas-prioritas yang ada, dan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan program;
6. Menetapkan panduan dan mendukung pendirian badan-badan pengawasan;
7. Mengelola perencanaan manajemen krisis lintas batas yang dapat timbul sewaktu-waktu, khususnya dengan lembaga-lembaga yang penting secara sistemis; dan
8. Berkolaborasi dengan IMF dalam menjalankan “Sistem Peringatan Dini” (*Early Warning Exercises*).

Saat ini, FSB diketuai oleh Mario Draghi, Gubernur bank sentral Italia. Anggota-anggota FSB, antara lain adalah:

1. Argentina: Banco Central de la República Argentina;

<sup>156</sup> *Komunike I G-20, Washington*, pasal 9 butir 5, “Reforming International Financial Institutions”.



2. Australia: Reserve Bank of Australia, The Treasury;
3. Brazil: Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Ministério da Fazenda;
4. Canada: Bank of Canada, Office of the Superintendent of Financial Institutions, Department of Finance;
5. China: People's Bank of China, China Banking Regulatory Commission, Ministry of Finance;
6. France: Banque de France, Autorité des Marchés Financiers, Ministère de l'Economie;
7. Germany: Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesministerium der Finanzen;
8. Hongkong SAR: Hong Kong Monetary Authority;
9. India: Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Ministry of Finance;
10. Indonesia: Bank Indonesia;
11. Italy: Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
12. Japan: Bank of Japan, Financial Services Agency, Ministry of Finance;
13. Mexico: Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México;
14. Netherlands: De Nederlandsche Bank, Ministry of Finance;
15. Republic of Korea: Bank of Korea, Financial Services Commission;
16. Russia: Central Bank of the Russian Federation, Federal Financial Markets Service, Ministry of Finance;
17. Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency;
18. Singapore: Monetary Authority of Singapore;
19. South Africa: Ministry of Finance;

20. Spain: Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda;
21. Switzerland: Swiss National Bank, Swiss Federal Department of Finance;
22. Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey;
23. United Kingdom: Bank of England, Financial Services Authority, HM Treasury;
24. United States of America: Board of Governors of the Federal Reserve System, U.S. Securities & Exchange Commission (SEC), U.S. Department of Treasury;
25. International Organizations: Bank for International Settlements (BIS), European Central Bank (ECB), European Commission (EC), International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Coordination and Development (OECD), The World Bank;
26. International standard setting bodies and other groupings: Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Committee on the Global Financial System (CGFS), Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Accounting Standards Board (IASB), International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Dalam mekanisme ini, setiap anggota FSB wajib statusnya dalam upaya mencapai dan menjaga kestabilan sistem keuangan, menjaga keterbukaan dan transparansi dalam sektor finansial, mengimplementasikan standar keuangan internasional (termasuk *12 key international Standards and Codes*)<sup>157</sup>, dan bersedia untuk di-review secara periodik oleh sesama anggota dengan menggunakan Financial Sector Assessment Program Reports yang disediakan oleh IMF / World Bank. *12 key standards* itu sebenarnya telah diciptakan oleh FSF sebelum FSB berdiri, hanya saja dalam implementasinya keefektifannya juga

---

<sup>157</sup> Dua belas pedoman dasar yang dicetuskan oleh FSB sebagai kunci untuk sistem keuangan yang komprehensif (*sound financial system*) di mana setiap area pedoman harus diprioritaskan untuk diimplementasikan, tergantung keadaan negara yang bersangkutan, lih. [http://www.financialstabilityboard.org/cos/key\\_standards.htm](http://www.financialstabilityboard.org/cos/key_standards.htm).

dipengaruhi oleh orientasi kebijakan ekonomi negara dan keadaan pasar.<sup>158</sup> Detil lengkap tentang *12 key standards* tersebut, antara lain:

**Tabel 5**  
***12 Key Standards for Sound Financial Systems***

| Area   | Standard  | Issuing Body       |
|--|---|--------------------|
| <b><i>Macroeconomic Policy and Data Transparency</i></b> |   |                    |
| Monetary and financial policy transparency               | <u>Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies</u>  | IMF                |
| Fiscal policy transparency                               | <u>Code of Good Practices on Fiscal Transparency</u>  | IMF                |
| Data dissemination                                       | <u>Special Data Dissemination Standard / General Data Dissemination System</u> <sup>1</sup>                                   | IMF                |
| <b><i>Institutional and Market Infrastructure</i></b>    |   |                    |
| Insolvency   | <u>Insolvency and Creditor Rights</u> <sup>2</sup>  | World Bank         |
| Corporate governance                                     | <u>Principles of Governance</u>   | OECD               |
| Accounting   | <u>International Accounting Standards (IAS)</u>   | IASB               |
| Auditing   | <u>International Standards on Auditing (ISA)</u>  | IFAC               |
| Payment and settlement                                   | <u>Core Principles for Systemically Important Payment Systems</u><br><u>Recommendations for Securities Settlement Systems</u> | CPSS               |
| Market integrity   | <u>The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force / 9 Special Recommendations Against Terrorist Financing</u>   | CPSS/IOSCO<br>FATF |
| <b><i>Financial Regulation and Supervision</i></b>       |   |                    |
| Banking supervision                                      | <u>Core Principles for Effective Banking Supervision</u>  | BCBS               |
| Securities regulation                                    | <u>Objectives and Principles of Securities Regulation</u>   | IOSCO              |
| Insurance supervision                                    | <u>Insurance Core Principles</u>  | IAIS               |

**Sumber:** FSB, *FSB online database*.

**Keterangan:**

<sup>158</sup> Penelitian ini tidak berupaya mencari jawaban tentang mengapa rezim finansial dan moneter internasional yang ada kurang efektif dalam mengantisipasi terjadinya krisis finansial global 2008, contohnya, melainkan memaparkan tentang benang merah antara kebijakan negara, kondisi pasar (termasuk *traditional* dan *shadow banking system*), dan proses penanggulangan krisis finansial global dalam tingkat global.

1. Negara-negara yang memiliki akses ke kapital internasional dianjurkan untuk mengadopsi SDSS yang lebih ketat, sementara negara-negara lainnya dianjurkan untuk mengadopsi GDSS.
2. World Bank bekerja sama dengan UNCITRAL dan para pakar internasional telah menyelesaikan dan mengimplementasikan ICR ROSC Assessment Methodology. ICR ROSC Assessment Methodology berasal dari Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems yang dikeluarkan World Bank, dan atas rekomendasi yang termasuk dalam UNCITRAL's Legislative Guide on Insolvency Law.

Berdasarkan daftar di atas, dapat kita lihat bahwa sudah terjadi upaya reformasi (dan regulasi yang lebih baik) atas sistem keuangan internasional yang didorong oleh negara (G-20) yang menggunakan berbagai institusi internasional untuk mencapai tujuan global tersebut. Signifikansi FSB yang tadinya hanya menjadi hak FSF (negara-negara maju atau G-8) kini diwarnai oleh peran *emerging markets* yang bermakna upaya regulasi dan penguatan rezim moneter internasional dilakukan di tingkat global, dan diharapkan dapat mencegah krisis yang sama pada masa depan, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang. FSB bekerja sama dengan IFI-IFI lainnya dalam menghasilkan terobosan baru dalam kaitannya dengan regulasi sistem keuangan global baru.

Hingga sejauh ini, FSB telah menerbitkan sebuah laporan lengkap tentang upaya memperkuat upaya stabilitas finansial internasional berdasarkan rekomendasi G-20 (komunike G-20).<sup>159</sup> Laporan tersebut berfokus pada dua level, yakni level implementasi nasional dan implementasi di tingkat internasional, antara lain:

#### 1. Level internasional

Berfokus pada aspek-aspek berikut:

- *Building high quality capital and liquidity standards and mitigating procyclicality;*
- *Reforming compensation practices to support financial stability;*
- *Improving over-the-counter derivatives markets;*
- *Addressing systemically important financial institutions and cross-border resolutions;*

<sup>159</sup> FSB, *Report of the Financial Stability Board to G20 Finance Ministers and Governors*, April 2010. Dapat diunduh melalui [https://www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_100419.pdf](https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_100419.pdf), dan diakses pada tanggal 1 Mei 2010.

- *Strengthening adherence to international supervisory and regulatory standards;*
- *Strengthening accounting standards;* dan
- *Other issues.*<sup>160</sup>

## 2. Level nasional dan regional

Berfokus pada aspek-aspek yang sama seperti di atas.

Laporan tersebut kemudian dikomunikasikan dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20, April 2010.

### 3.5. Peran Negara dan Model Kerja sama G-20

Berdasarkan konteks pembahasan penelitian, peran penting negara dalam penanganan krisis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu penegakan otoritas terhadap *shadow banking system* dan ekspansi kebijakan ekonomi.

Dalam *shadow banking system* seperti yang digambarkan pada bab II, sumber pendanaan / sumber kapital di luar bank-bank konvensional (tradisional) yang berada di luar area pengawasan lembaga finansial internasional, ketentuan internasional, atau otoritas negara juga mendapat sorotan dari negara-negara anggota G-20. Mereka menyatakan sikapnya secara tegas terhadap otoritas-otoritas yang dikenal sebagai “*tax haven*” ini, “*The era of banking secrecy is over*”.<sup>161</sup> Regulasi sistem finansial yang longgar, kebijakan otoritas yang tidak mengikuti cepatnya inovasi dunia perbankan/finansial, serta maraknya praktik *shadow banking system* dan pelarian pajak negara merupakan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab krisis finansial global. G-20 melalui jalur OECD kemudian menerbitkan daftar kepatuhan *internationally agreed tax standard* dan daftar *tax haven* untuk melakukan tekanan internasional yang pada ujungnya demi tercapainya reformasi dan kestabilan sistem moneter internasional. Berikut adalah dua daftar dari dua periode berbeda yang dimaksudkan tersebut:

<sup>160</sup> Termasuk *Developing macroprudential policy frameworks and tools, Differentiated nature and scope of regulation, Hedge funds, Credit rating agencies, Supervisory colleges, dan Securitisation.*

<sup>161</sup> Komunike G-20 London 2009, pasal 15 butir ke-7.

Gambar 11

**A PROGRESS REPORT ON THE JURISDICTIONS SURVEYED BY THE OECD GLOBAL FORUM IN IMPLEMENTING THE INTERNATIONALLY AGREED TAX STANDARD<sup>1</sup>**

Progress made as at 2<sup>nd</sup> April 2009 (latest version of report: [www.oecd.org/tax/progressreport](http://www.oecd.org/tax/progressreport))

| Jurisdictions that have substantially implemented the internationally agreed tax standard |             |                    |                      |  |  |
|---|-------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Argentina   | Germany     | Korea              | Seychelles           |  |  |
| Australia   | Greece      | Malta              | Slovak Republic      |  |  |
| Barbados  | Guernsey    | Mauritius          | South Africa         |  |  |
| Canada  | Hungary     | Mexico             | Spain                |  |  |
| China <sup>2</sup>  | Iceland     | Netherlands        | Sweden               |  |  |
| Cyprus  | Ireland     | New Zealand        | Turkey               |  |  |
| Czech Republic  | Isle of Man | Norway             | United Arab Emirates |  |  |
| Denmark   | Italy       | Poland             | United Kingdom       |  |  |
| Finland   | Japan       | Portugal           | United States        |  |  |
| France  | Jersey      | Russian Federation | US Virgin Islands    |  |  |

| Jurisdictions that have committed to the internationally agreed tax standard, but have not yet substantially implemented |                    |                      |                          |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Jurisdiction   | Year of Commitment | Number of Agreements | Jurisdiction             | Year of Commitment | Number of Agreements |
| <b>Tax Havens<sup>3</sup></b>  |                    |                      |                          |                    |                      |
| Andorra  | 2009               | (0)                  | Marshall Islands         | 2007               | (1)                  |
| Anguilla   | 2002               | (0)                  | Monaco                   | 2009               | (1)                  |
| Antigua and Barbuda  | 2002               | (7)                  | Montserrat               | 2002               | (0)                  |
| Aruba  | 2002               | (4)                  | Nauru                    | 2003               | (0)                  |
| Bahamas  | 2002               | (1)                  | Neth. Antilles           | 2000               | (7)                  |
| Bahrain  | 2001               | (6)                  | Niue                     | 2002               | (0)                  |
| Belize   | 2002               | (0)                  | Panama                   | 2002               | (0)                  |
| Bermuda  | 2000               | (3)                  | St Kitts and Nevis       | 2002               | (0)                  |
| British Virgin Islands   | 2002               | (3)                  | St Lucia                 | 2002               | (0)                  |
| Cayman Islands <sup>4</sup>  | 2000               | (8)                  | St Vincent & Grenadines  | 2002               | (0)                  |
| Cook Islands   | 2002               | (0)                  | Samoa                    | 2002               | (0)                  |
| Dominica   | 2002               | (1)                  | San Marino               | 2000               | (0)                  |
| Gibraltar  | 2002               | (1)                  | Turks and Caicos Islands | 2002               | (0)                  |
| Grenada  | 2002               | (1)                  | Vanuatu                  | 2003               | (0)                  |
| Liberia  | 2007               | (0)                  |                          |                    |                      |
| Liechtenstein  | 2009               | (1)                  |                          |                    |                      |
| <b>Other Financial Centres</b>   |                    |                      |                          |                    |                      |
| Austria <sup>5</sup>   | 2009               | (0)                  | Guatemala                | 2009               | (0)                  |
| Belgium <sup>5</sup>   | 2009               | (1)                  | Luxembourg <sup>5</sup>  | 2009               | (0)                  |
| Brunei   | 2009               | (5)                  | Singapore                | 2009               | (0)                  |
| Chile  | 2009               | (0)                  | Switzerland <sup>5</sup> | 2009               | (0)                  |

| Jurisdictions that have not committed to the internationally agreed tax standard |                      |              |                      |
|--|----------------------|--------------|----------------------|
| Jurisdiction   | Number of Agreements | Jurisdiction | Number of Agreements |
| Costa Rica   | (0)                  | Philippines  | (0)                  |
| Malaysia (Labuan)  | (0)                  | Uruguay      | (0)                  |

**Sumber:** OECD, *OECD online database*, April 2009.

Keterangan:

1. *The internationally agreed tax standard* yang dikembangkan OECD dan dengan kerja sama negara-negara non-OECD, dan yang dikemukakan oleh para menteri keuangan g-20 pada Berlin Meeting tahun 2004 dan oleh UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters pada pertemuan Oktober 2008, memerlukan pertukaran informasi terkait urusan pajak berdasarkan permintaan yang berwenang, termasuk meminta data-data pajak yang sensitif atau rahasia bank yang berkaitan dengan pajak. *Standard* ini juga menyediakan perlindungan meluas untuk melindungi kerahasiaan pertukaran informasi tersebut.
2. Tidak termasuk Daerah Administrasi Khusus yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan *the internationally agreed tax standard*.
3. Wilayah-wilayah yurisdiksi ini diidentifikasi pada tahun 2000 dalam sebuah pertemuan tentang kriteria *tax haven*, seperti yang digambarkan dalam laporan OECD tahun 1998.

4. Kepulauan Cayman telah merumuskan peraturan pemerintah yang memberi ruang bagi pertukaran informasi secara universal, dan OECD telah mengidentifikasi 12 negara yang sedang bersiap-siap untuk melakukan hal serupa. PP ini sedang dikaji oleh OECD.

5. Austria, Belgia, Luksemburg, dan Swiss mundur dari kesediaannya terhadap pasal 26 Konvensi OECD Model Tax. Belgia telah menyurati 48 negara untuk mengajukan kesimpulan protokol dalam rangka memperbaharui pasal 26 perjanjian mereka. Austria, luksemburg, dan Swiss telah mengumumkan bahwa mereka telah menyurati para mitra perjanjiannya untuk memberikan sinyal bahwa mereka siap melakukan renegotiasi perjanjian mereka, dan masuknya pasal 26 yang baru itu.

Dalam daftar tahun 2009 tersebut terdapat tiga level, yaitu wilayah yurisdiksi yang telah berkomitmen dan telah mengimplementasikan *the internationally agreed standard* secara substansial (menyeluruh), yang telah berkomitmen tapi belum mengimplementasikan secara menyeluruh, dan yurisdiksi yang belum berkomitmen dan belum mengimplementasikan konvensi standar internasional itu. Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2008, terdapat 40 yurisdiksi yang telah mengimplementasikan standar internasional, 38 yurisdiksi yang berkomitmen tapi belum melaksanakannya, dan 4 yurisdiksi yang belum berkomitmen dan belum mengimplementasikan. Komposisi level I didominasi oleh negara-negara maju yang sudah mengimplementasikan (termasuk AS sebagai sumber krisis), komposisi level II mencakup sumber-sumber *offshore shadow banking system*, seperti Swiss, Singapura, Luksemburg, kepulauan Bahama, Panama, dan lain-lain, serta level II di mana Kosta Rika, Malaysia, Filipina, dan Uruguay termasuk dalam daftar yurisdiksi yang belum berkomitmen dan mengimplementasikan *the internationally agreed tax standard*.

Sebagai data pembandingan, OECD kemudian menerbitkan daftar kedua pada tahun 2010 untuk mengulas perkembangan-perkembangan yang ada. Daftar tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 12

**A PROGRESS REPORT ON THE JURISDICTIONS SURVEYED BY THE OECD GLOBAL FORUM IN IMPLEMENTING THE INTERNATIONALLY AGREED TAX STANDARD<sup>1</sup>**

Progress made as at 27<sup>th</sup> May 2010 (Original Progress Report 2<sup>nd</sup> April 2009)

| Jurisdictions that have substantially implemented the internationally agreed tax standard |                |                      |                               |  |  |
|---|----------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
| Andorra   | Czech Republic | Japan                | St Lucia                      |  |  |
| Anguilla  | Denmark        | Jersey               | St Vincent and the Grenadines |  |  |
| Antigua and Barbuda   | Dominica       | Korea                | Samoa                         |  |  |
| Argentina   | Estonia        | Liechtenstein        | San Marino                    |  |  |
| Aruba   | Finland        | Luxembourg           | Seychelles                    |  |  |
| Australia   | France         | Malaysia             | Singapore                     |  |  |
| Austria   | Germany        | Malta                | Slovak Republic               |  |  |
| The Bahamas   | Gibraltar      | Mauritius            | Slovenia                      |  |  |
| Bahrain   | Greece         | Mexico               | South Africa                  |  |  |
| Barbados  | Grenada        | Monaco               | Spain                         |  |  |
| Belgium   | Guernsey       | Netherlands          | Sweden                        |  |  |
| Bermuda   | Hungary        | Netherlands Antilles | Switzerland                   |  |  |
| British Virgin Islands  | Iceland        | New Zealand          | Turkey                        |  |  |
| Canada  | India          | Norway               | Turks and Caicos Islands      |  |  |
| Cayman Islands  | Ireland        | Poland               | United Arab Emirates          |  |  |
| Chile   | Isle of Man    | Portugal             | United Kingdom                |  |  |
| China <sup>2</sup>  | Israel         | Russian Federation   | United States                 |  |  |
| Cyprus  | Italy          | St Kitts and Nevis   | US Virgin Islands             |  |  |

| Jurisdictions that have committed to the internationally agreed tax standard, but have not yet substantially implemented |                    |                      |              |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Jurisdiction   | Year of Commitment | Number of Agreements | Jurisdiction | Year of Commitment | Number of Agreements |
| <b>Tax Havens<sup>3</sup></b>  |                    |                      |              |                    |                      |
| Belize   | 2002               | (4)                  | Nauru        | 2003               | (0)                  |
| Cook Islands   | 2002               | (11)                 | Niue         | 2002               | (0)                  |
| Liberia  | 2007               | (1)                  | Panama       | 2002               | (1)                  |
| Marshall Islands   | 2007               | (2)                  | Vanuatu      | 2003               | (2)                  |
| Montserrat   | 2002               | (3)                  |              |                    |                      |
| <b>Other Financial Centres</b>   |                    |                      |              |                    |                      |
| Brunei   | 2009               | (9)                  | Philippines  | 2009               | (0)                  |
| Costa Rica   | 2009               | (1)                  | Uruguay      | 2009               | (5)                  |
| Guatemala  | 2009               | (0)                  |              |                    |                      |

| Jurisdictions that have not committed to the internationally agreed tax standard                             |                      |              |                      |
|--|----------------------|--------------|----------------------|
| Jurisdiction   | Number of Agreements | Jurisdiction | Number of Agreements |
| All jurisdictions surveyed by the Global Forum have now committed to the internationally agreed tax standard |                      |              |                      |

**Sumber:** OECD, *OECD online database*, Mei 2010.

**Keterangan:**

1. *The internationally agreed tax standard* yang dikembangkan OECD dan dengan kerja sama negara-negara non-OECD, dan yang dikemukakan oleh para menteri keuangan g-20 pada Berlin Meeting tahun 2004 dan oleh UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters pada pertemuan Oktober 2008, memerlukan pertukaran informasi terkait urusan pajak berdasarkan permintaan yang berwenang, termasuk meminta data-data pajak yang sensitif atau rahasia bank yang berkaitan dengan pajak. *Standard* ini juga menyediakan perlindungan meluas untuk melindungi kerahasiaan pertukaran informasi tersebut.
2. Tidak termasuk Daerah Administrasi Khusus yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan *the internationally agreed tax standard*.
3. Wilayah-wilayah yurisdiksi ini diidentifikasi pada tahun 2000 dalam sebuah pertemuan tentang kriteria tax haven, seperti yang digambarkan dalam laporan OECD tahun 1998.

Sama seperti daftar pada tahun 2009, daftar ini juga memuat tiga level. Sebanyak 72 yurisdiksi sudah mengimplementasikan standar internasional OECD tersebut secara



menyeluruh, 14 yurisdiksi yang telah berkomitmen tapi belum mengimplementasikan secara menyeluruh, dan tidak ada lagi yurisdiksi yang belum berkomitmen dan belum mengimplementasikan. Berdasarkan tabel ini, perkembangan penerapan standar internasional tersebut membutuhkan proses dan tahapan-tahapan tertentu. Ini tampak dari kecenderungan yurisdiksi-yurisdiksi yang tadinya berada di level II kemudian berhasil pindah ke level I (contohnya kepulauan Bahama, Singapura, dan lain-lain), dan dari level III ke level II (contohnya Kosta Rika, Filipina, dan Uruguay). Hal menarik lain, ada beberapa yurisdiksi yang tetap bertahan dengan *status quo* (Panama dan Brunei contohnya tetap di level II).

Dengan melihat perkembangan implementasi yang digagas OECD ini, signifikansi peran negara terhadap sektor finansial yang kemudian memengaruhi rezim dan yurisdiksi (termasuk negara) lain kemudian menjadi relevan.

Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya itu, kita juga dapat melihat bagaimana dominasi negara terhadap penanganan krisis finansial melalui kebijakan ekonomi yang diterapkannya. Dua isu mendasar dalam perekonomian global pada masa krisis finansial selain kurang tersedianya likuiditas di pasaran internasional dan menumpuknya aliran dana internasional (*international capital flows*) ke satu (atau beberapa) entitas ekonomi tertentu, yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin tingginya tingkat pengangguran di berbagai negara dunia. Hal tersebut disadari oleh para pemimpin G-20 sehingga program kebijakan G-20 pada masa krisis dapat mencakup penanganan isu-isu tersebut. Hal itu salah satunya tercermin melalui semboyan KTT G-20 yang kedua di London, yaitu “*growth, stability, jobs*”.<sup>162</sup> Oleh karena itu, negara-negara G-20 juga menempuh ekspansi kebijakan ekonomi. Salah satunya seperti kebijakan fiskal yang dianggap dapat menjadi stimulan atau pendorong pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu agenda penting dalam komitmen G-20.

---

<sup>162</sup> G-20, *G-20 Officials Edition Publication*, April 2009.

**Tabel 6**  
**Melihat lebih dalam Paket Stimulus negara-negara G-20**

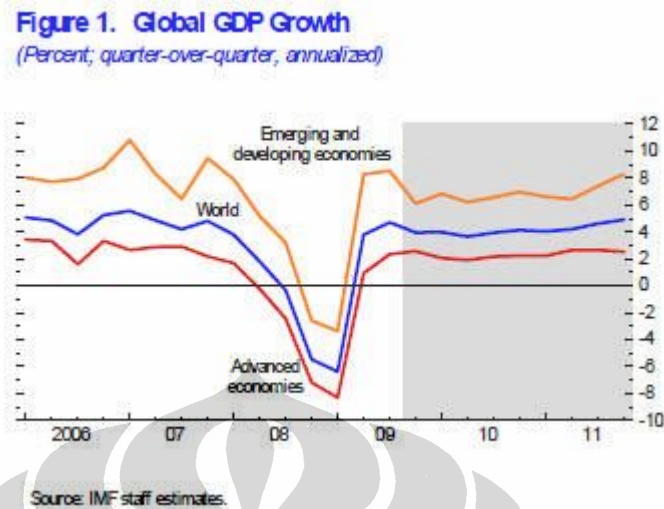
|              | Initial Conditions                   |                                   | Spending in 2009 |                  |               | Total size of stimulus |                  |               |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|              | Gross Public Debt (percent 2008 GDP) | Fiscal Balance (percent 2008 GDP) | USD amount (bb)  | Percent 2008 GDP | Tax cut share | USD amount (bb)        | Percent 2008 GDP | Tax cut share |
| Argentina    | 51.0%                                | 1.7%                              | 4.4              | 1.3%             | 0.0%          | 4.4                    | 1.3%             | 0.0%          |
| Australia    | 15.4%                                | 0.3%                              | 8.5              | 0.8%             | 47.9%         | 19.3                   | 1.8%             | 41.2%         |
| Brazil       | 40.7%                                | N/A                               | 5.1              | 0.3%             | 100.0%        | 8.6                    | 0.5%             | 100.0%        |
| Canada       | 62.3%                                | 0.1%                              | 23.2             | 1.5%             | 40.4%         | 43.6                   | 2.8%             | 45.4%         |
| China        | 15.7%                                | 0.4%                              | 90.1             | 2.1%             | 0.0%          | 204.3                  | 4.8%             | 0.0%          |
| France       | 64.4%                                | -2.9%                             | 20.5             | 0.7%             | 6.5%          | 20.5                   | 0.7%             | 6.5%          |
| Germany      | 62.6%                                | 0.9%                              | 55.8             | 1.5%             | 68.0%         | 130.4                  | 3.4%             | 68.0%         |
| India        | 59.0%                                | -4.2%                             | 6.5              | 0.5%             | 0.0%          | 6.5                    | 0.5%             | 0.0%          |
| Indonesia    | 30.1%                                | -1.3%                             | 6.7              | 1.3%             | 79.0%         | 12.5                   | 2.5%             | 79.0%         |
| Italy        | 103.7%                               | -2.7%                             | 4.7              | 0.2%             | 0.0%          | 7.0                    | 0.3%             | 0.0%          |
| Japan        | 170.4%                               | -3.1%                             | 66.1             | 1.4%             | 30.0%         | 104.4                  | 2.2%             | 30.0%         |
| Korea        | 27.2%                                | 0.9%                              | 13.7             | 1.4%             | 17.0%         | 26.1                   | 2.7%             | 17.0%         |
| Mexico       | 20.3%                                | 0.0%                              | 11.4             | 1.0%             | 0.0%          | 11.4                   | 1.0%             | 0.0%          |
| Russia       | 6.8%                                 | 6.2%                              | 30.0             | 1.7%             | 100.0%        | 30.0                   | 1.7%             | 100.0%        |
| Saudi Arabia | 17.7%                                | 11.2%                             | 17.6             | 3.3%             | 0.0%          | 49.6                   | 9.4%             | 0.0%          |
| South Africa | 29.9%                                | 0.2%                              | 4.0              | 1.3%             | 0.0%          | 7.9                    | 2.6%             | 0.0%          |
| Spain        | 38.5%                                | -2.4%                             | 18.2             | 1.1%             | 36.7%         | 75.3                   | 4.5%             | 36.7%         |
| Turkey       | 37.1%                                | -1.5%                             | 0.0              | 0.0%             | N/A           | 0.0                    | 0.0%             | N/A           |
| UK           | 47.2%                                | -4.8%                             | 37.9             | 1.4%             | 73.0%         | 40.8                   | 1.5%             | 73.0%         |
| US           | 60.8%                                | -3.2%                             | 268.0            | 1.9%             | 44.0%         | 841.2                  | 5.9%             | 34.8%         |

**Sumber:** Eswar Prasad and Isaac Sorkin, *Brookings Institute publication*, Mei 2010.

Kebijakan stimulus negara-negara G-20 tersebut diterapkan dalam rangka mempertahankan dan/atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masing-masing-negara yang kemudian berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global. Perlambatan dan pertumbuhan ekonomi global dapat dilihat seperti pada laporan *World Economic Outlook* yang dikeluarkan IMF sebagai berikut.<sup>163</sup>

<sup>163</sup> IMF, *World Economic Outlook*, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/update/01/index.htm>, diakses pada tanggal 14 Mei 2010.

**Gambar 13**  
**Pertumbuhan GDP Global 2006 – 2011**



Berdasarkan statistik tersebut, tampak pertumbuhan GDP dunia mulai turun sejak pertengahan tahun 2006 tepat setelah terjadinya *boom economy* di AS, dan mencapai titik kritis dan terendahnya pada pertengahan tahun 2008. Pertumbuhan dan pemulihan GDP global mulai tampak sejak kuartal ketiga tahun 2009. Secara garis besar, besaran rata-rata pertumbuhan GDP dunia berada di antara pertumbuhan GDP negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara maju merupakan pihak yang paling terpuak pada krisis kali ini, tapi tidak berarti bahwa negara-negara berkembang tidak merasakan dampak krisis. Hal tersebut dapat kita simak di mana negara-negara berkembang juga mengalami pertumbuhan negatif antara kuartal I 2008 hingga terlihat stabil pada kuartal I 2009.

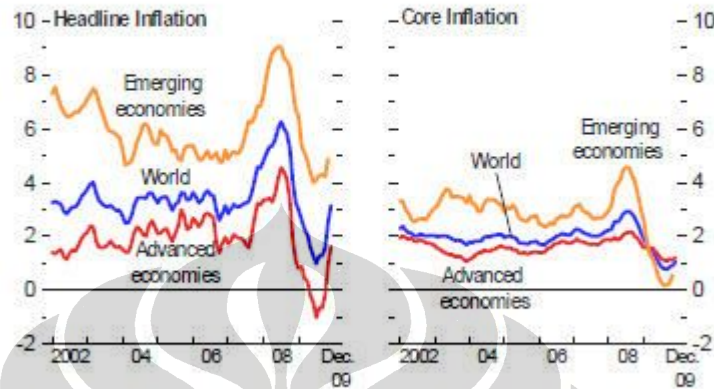
Selain itu, kebijakan moneter juga memainkan peran penting dalam penanganan krisis finansial. Bank-bank sentral di banyak negara menurunkan suku bunga (*interest rate*) demi memacu aktivitas perbankan yang pada ujungnya berimplikasi pada aliran kapital global (*global capital flows*) dan terjaganya investasi domestik. Hal tersebut dapat kita cermati salah satunya dengan indikator makroekonomi, seperti tingkat inflasi yang dijabarkan dalam grafik sebagai berikut:<sup>164</sup>

<sup>164</sup> IMF, *Ibid*

### Gambar 14 Tingkat Inflasi Global 2002 – 2009

**Figure 3. Global Inflation**

(Twelve-month change in the consumer price index unless otherwise noted)



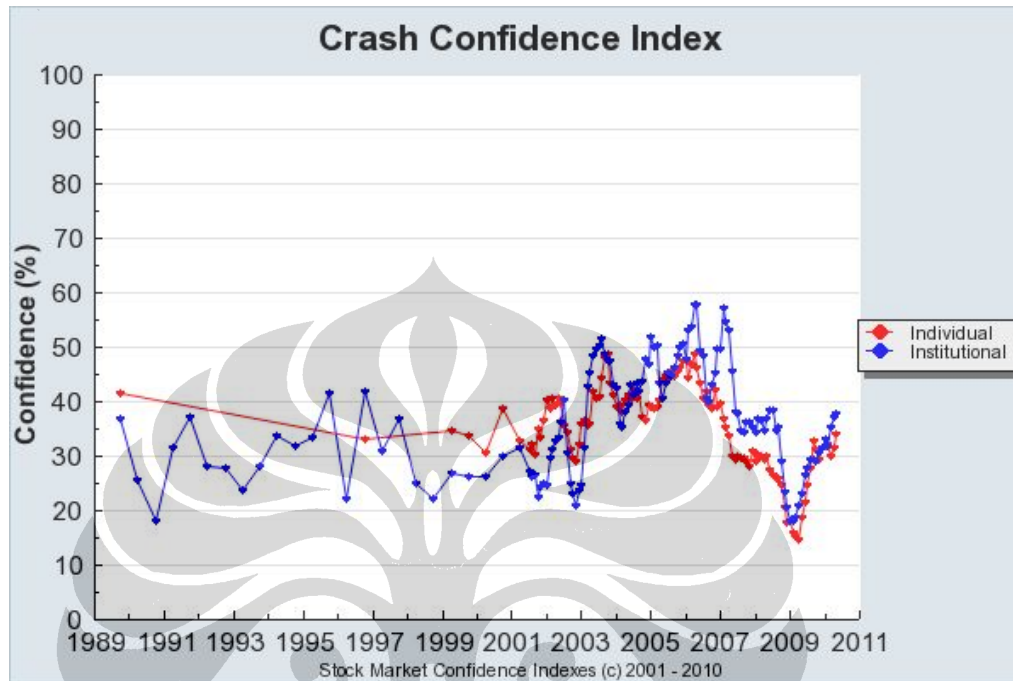
Secara garis besar, tingkat inflasi sangat tergantung dari kebijakan otoritas dan situasi negara per periode tertentu. Sudah lazim jika tingkat inflasi selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu berhubung indikator makroekonomi ini berangkat dari kestabilan variabel-variabel domestik masing-masing negara. Meski demikian, krisis finansial sekarang memberikan pengaruh yang masif bagi banyak negara. Berdasarkan statistik di atas, dapat kita lihat bahwa tingkat inflasi di negara-negara maju yang merupakan sumber krisis terlihat abnormal (terendah hingga mencapai titik negatif) pada pertengahan tahun 2008. Inflasi di negara-negara berkembang juga setali tiga uang, tapi tidak sampai menyentuh titik 0%.

Selain kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomis tersebut, peran penting negara-negara G-20 dalam penanganan krisis finansial juga terletak pada tiga faktor, yaitu komitmen, koordinasi kolektif (global), dan implementasi. Negara tidak bertindak sendiri dalam penanganan krisis, ada institusi-institusi keuangan internasional seperti IMF, World Bank, FSB, Multilateral Development Banks (MDBs), dan lain-lain yang juga menjalankan perannya masing-masing. Posisi negara-negara anggota G-20 pada skema multilateralisme ini dapat kita lihat pada skema-skema kerja sama berikut ini:

Selain itu, untuk melihat bagaimana reaksi pasar terkait semua kontribusi negara (G-20) dan kerja sama keuangan internasional yang diterapkan itu, salah satunya dengan menilik indeks kepercayaan pasar. Indeks ini relevan dalam mengamati pola ekonomi-politik

internasional pada masa krisis dan aktivitas perekonomian yang ada, sesuai dengan salah satu misi dalam komunike G-20, yakni mengembalikan kepercayaan pasar.

**Gambar 15**

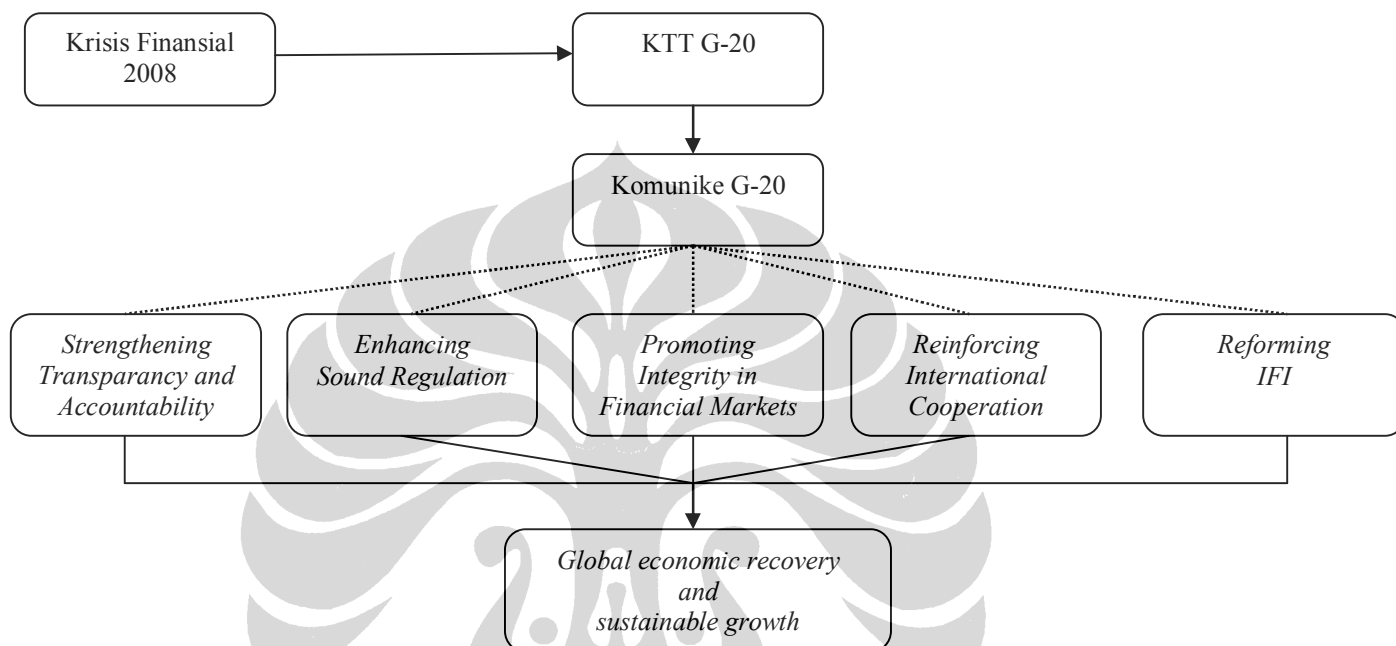


**Sumber:** Yale University, *Yale School of Management Stock Market Confidence Indexes*, Juni 2010.

Statistik di atas menunjukkan tentang kepercayaan pasar (secara institusi dan individu) atas kemungkinan tidak terjadinya lagi *crash* di pasar saham. Dari indeks institusi, posisi *market confidence* mencapai puncaknya pada April 2006 (57,96%), sebelum berangsur-angsur turun pada Desember 2007 (35,18%), 20,58% pada Desember 2008, titik terendah pada Maret 2009 (18,61%), sebelum naik lagi hingga Mei 2010 (37,93%). Dari indeks individu, pola tersebut juga kurang lebih sama, yakni 48,61% pada April 2006, 30,93% pada Desember 2007, 17,72% pada Desember 2008, 15,38% pada Maret 2009, dan naik lagi menjadi 34,21% pada Mei 2010.

Sementara itu, proses dan posisi peran negara dalam kerja sama G-20 atas krisis finansial global dapat dilihat pada model-model berikut ini:

**Gambar 16**  
**Skema Normatif Komitmen Kerja sama Internasional G-20**



Keterangan: Skema diolah penulis berdasarkan komunike G-20 I di Washington 2008, yang II di London 2009, dan yang III di Pittsburgh 2009.

Krisis finansial global 2008 yang bermula dari AS telah menyebabkan *massive defaults* dan ambruknya banyak institusi keuangan dan sektor riil, salah satunya karena aliran kapital global tertumpuk di sektor perumahan AS yang sangat berisiko dan telah dieksploitasi banyak pelaku bisnis. Inilah yang kemudian mendorong pertemuan global antara negara-negara perekonomian besar dunia, yakni G-20. Dalam dinamikanya hingga tahun 2009, forum G-20 telah menghasilkan sebanyak tiga komunike sebagai respons atas ancaman krisis finansial global. Pada dasarnya, ketiga komunike G-20 diciptakan atas dasar lima prinsip bersama dalam mencapai pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global yang berkesinambungan itu, antara lain:

1. *Strengthening Transparency and Accountability*

Secara normatif, prinsip ini akan diterapkan dengan mengusahakan transparansi pasar finansial negara-negara maju, termasuk transparansi produk-produk derivatif perbankan dan memberikan insentif yang sesuai kepada dunia perbankan demi menghindari pengambilan risiko pemberian kredit yang berlebihan.

## 2. *Enhancing Sound Regulation*

Pengawasan dan perundangan-undangan terhadap sistem perbankan dan dunia finansial akan lebih diperketat, termasuk di antaranya mengoptimalkan kinerja agensi *credit-rating* berdasarkan *framework* dan *code of conduct* yang telah dibuat.

## 3. *Promoting Integrity in Financial Markets*

Prinsip ini memberikan jaminan integritas pasar finansial negara-negara maju kepada para investor dunia dan komitmen untuk melindungi hak-hak para konsumen, termasuk di dalamnya menindak pihak-pihak yang telah terlibat dalam shadow banking system agar tunduk pada standar internasional.

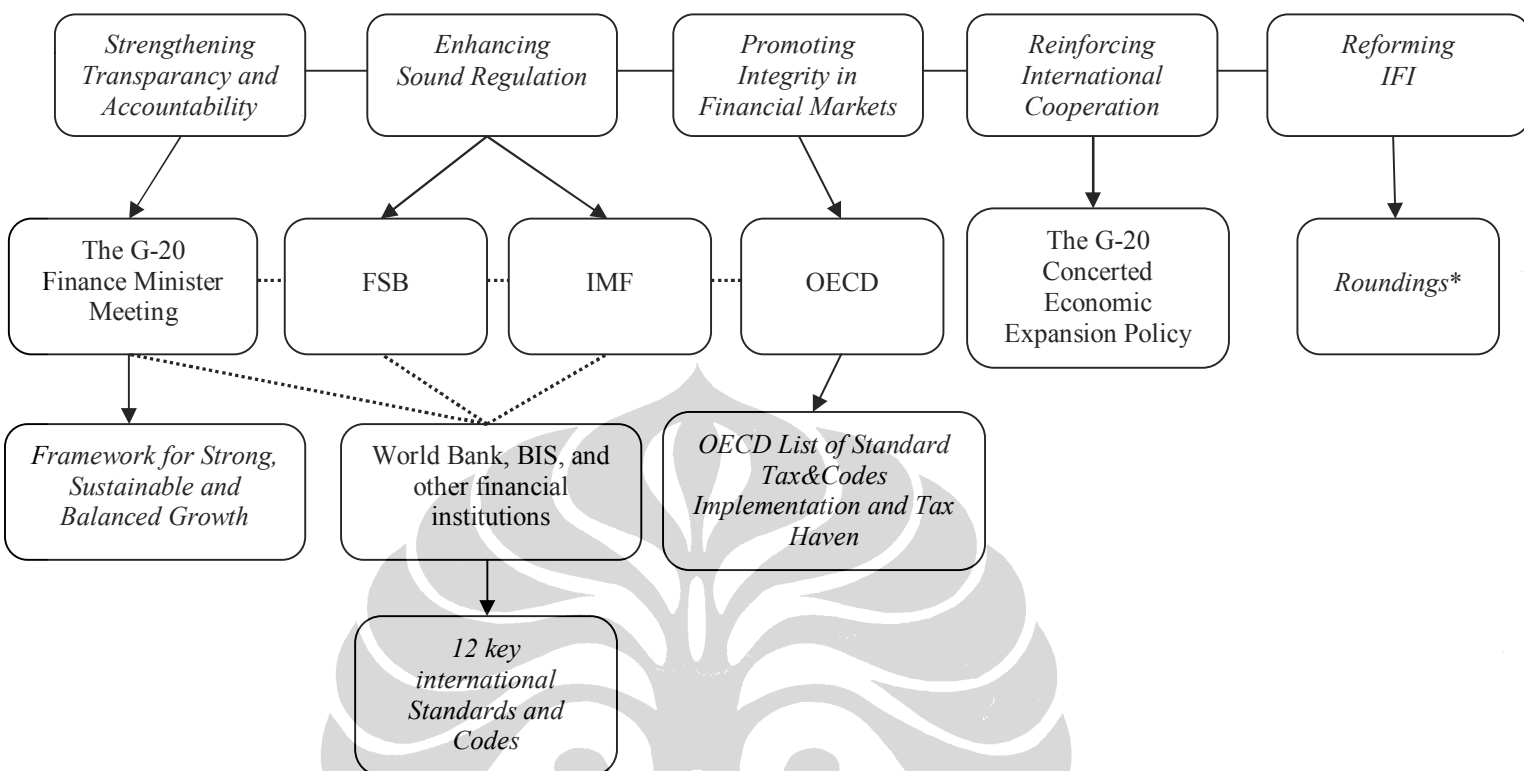
## 4. *Reinforcing International Cooperation*

Secara normatif, penguatan kerja sama internasional merupakan komitmen tiap negara anggota G-20 untuk menjaga berjalannya agenda *free-trade* dan kerja sama kolektif penanganan krisis, baik dengan sesama anggota maupun dengan lembaga/institusi keuangan yang berada di bawah otoritas masing-masing.

## 5. *Reforming International Financial Institutions*

Prinsip ini memuat tentang rencana reformasi keanggotaan IMF, terutama dalam hal distribusi kuota dan *voting power* yang lebih kepada negara-negara berkembang, sesuai dengan kontribusi negara-negara berkembang terhadap perekonomian global dewasa ini. Pada prinsip ini pula disebutkan pula tentang rencana dan implementasi perluasan keanggotaan Financial Stability Forum (FSF) yang ada.

**Gambar 17**  
**Skema Implementatif Komitmen Kerja sama Internasional G-20**



**Keterangan:** \*Roundings termasuk kesepakatan *expanded NAB* hingga 12 April 2010 dan rencana distribusi kuota dan *voting power* negara-negara anggota yang akan dikaji ulang kembali pada Januari 2011.

**Legenda:**

- > Alur kronologis
- ..... Koordinasi struktural

Skema implementatif di atas merupakan model ringkasan dari penjelasan deskriptif dan penjelasan statistik dari seluruh subbab penelitian yang penulis paparkan sebelumnya. Terdapat lima poin implementatif yang dapat penulis sorot, sesuai dengan variabel dan data-data yang tersedia terkait penanganan krisis finansial global 2008-2009 melalui kerja sama G-20, antara lain:

#### 1. *Strengthening Transparency and Accountability*

Prinsip transparansi sistem keuangan internasional diterapkan oleh negara-negara dunia yang kemudian mengeluarkan "Action Plan" (program kerja selama 1 tahun atau lebih) melalui pertemuan tahunan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. *Action plan* tersebut kemudian ditindaklanjuti secara multilateral oleh



beberapa institusi internasional selain negara, seperti IMF, FSB, World Bank, BIS, OECD, dan lain-lain. Hasil konkret dari prinsip transparansi ini salah satunya adalah *Framework for Strong and Sustainable Growth* yang ditandatangani pada pertemuan III G-20 di Washington, 2009.

## 2. *Enhancing Sound Regulation*

Prinsip penguatan regulasi keuangan internasional melibatkan banyak lembaga keuangan internasional. Negara dapat mencanangkan kebijakan nasionalnya masing-masing secara kolektif, tapi perumusan dan pengawasan regulasi keuangan global membutuhkan rezim internasional pula berhubung integrasi sistem moneter semakin erat, baik secara sifat lintas batas kapital (*trans-border capital movements*) maupun secara implikasi ekonomi-politik internasional yang dapat dilihat dari indikator kebijakan nasional dan keadaan ekonomi-politik global secara keseluruhan. Prinsip penguatan regulasi sistem keuangan telah menghasilkan produk konkret salah satunya yaitu *12 key international standard and codes* yang notabene merupakan kontribusi banyak institusi keuangan internasional yang bergerak atas dorongan G-20 dalam mereformasi sistem keuangan global. Meski demikian, regulasi sistem keuangan global belum selesai, dan proses tersebut akan terus berjalan seiring berkembangnya keadaan ekonomi-politik global dan cepatnya inovasi dalam dunia perbankan dan investasi. Masih terdapat beberapa celah yang ditinggalkan konvensi-konvensi sebelumnya, contohnya konvensi Basel II yang secara normatif mengatur tentang cadangan minimum bank dan pengambilan risiko kredit oleh bank, tapi pada praktiknya rawan dieksploitasi oleh para pelaku bisnis dan kebijakan otoritas yang salah.

## 3. *Promoting Integrity in Financial Markets*

Salah satu penyebab krisis finansial di Asia pada 1997 adalah *moral hazard* dan hilangnya kepercayaan pasar terhadap kredibilitas negara yang telah membuat kebijakan yang tidak tepat. Pola tersebut hampir terulang pada krisis finansial global 2008, tapi tidak benar-benar terjadi 100% karena sistem moneter dunia sedikit banyak masih bergantung pada *status quo* (*greenback*). Untuk mengembalikan kepercayaan pasar sepenuhnya, para pembuat kebijakan di G-20 mempromosikan prinsip integritas dalam pasar finansial. Salah satu hasil konkretnya adalah penindakan terhadap

*shadow banking system*, termasuk menindak *tax-havens*. G-20 menggunakan rezim OECD untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengeluarkan daftar kepatuhan (*compliance list*) pada dua periode yang berbeda, yakni tahun 2009 dan 2010.

#### 4. *Reinforcing International Cooperation*

G-20 sebagai wahana kerja sama *ad hoc* menghasilkan dorongan konsensus bagi para anggotanya untuk tetap pada agenda globalisasi, dan sepakat untuk tidak mundur ke kebijakan nasional yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi global, proteksionisme contohnya. Konkretnya, kerja sama kolektif ini tercermin melalui *shared policy* masing-masing yang kemudian dibahas pada pertemuan reguler G-20. Selain tambahan alokasi kapital ke badan internasional seperti IMF dan World Bank, juga perluasan keanggotaan FSF menjadi FSB, ekspansi kebijakan ekonomi (moneter dan fiskal) yang dilakukan secara serentak menjadi salah satu kunci penting dalam kerja sama pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global ini.

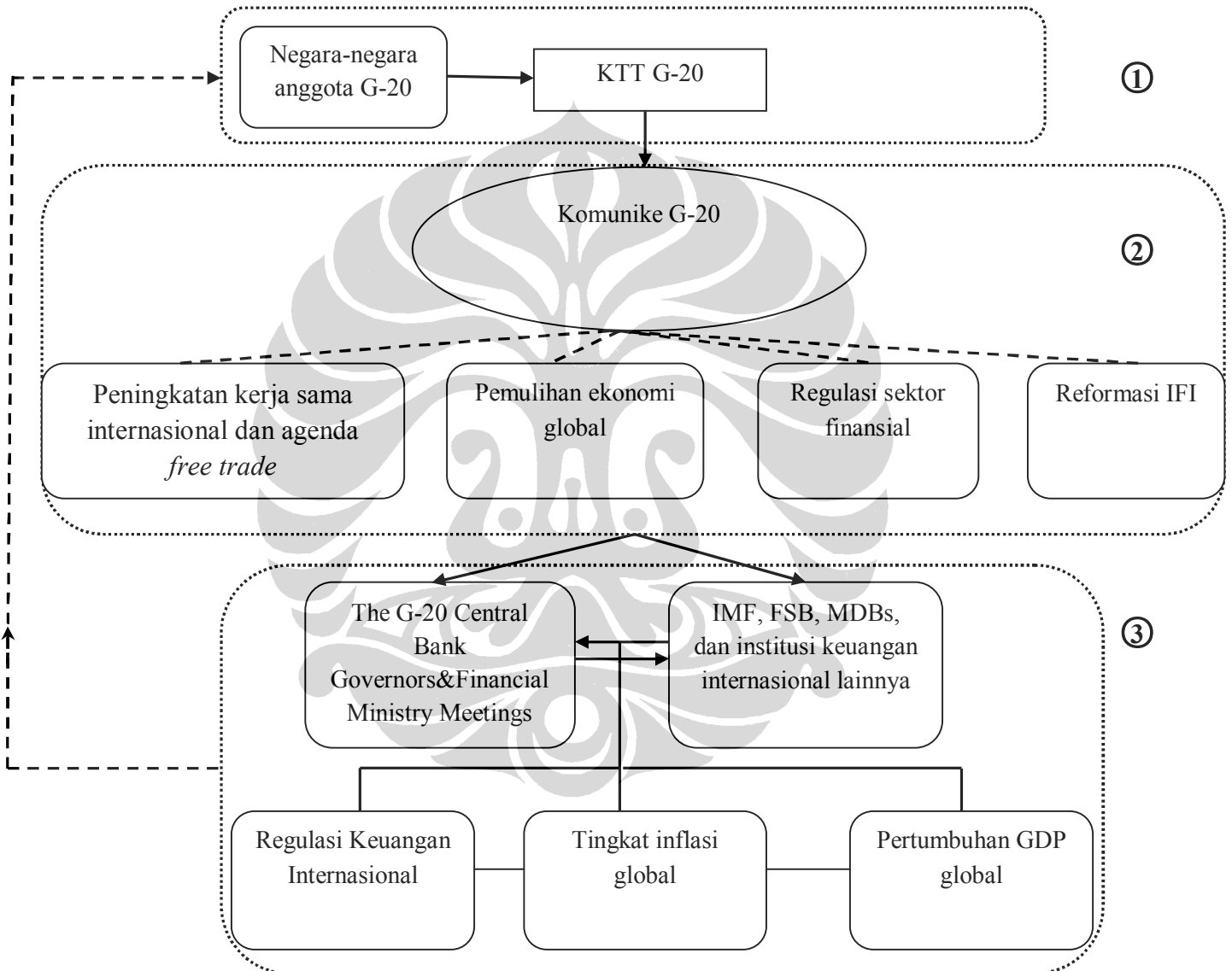
#### 5. *Reforming International Financial Institutions*

Peran dan kontribusi negara-negara berkembang yang semakin signifikan terhadap perekonomian dunia merupakan isu utama yang mendorong reformasi IFI. Representasi suara dan kuota, *voting power*, hingga kapabilitas staf dalam institusi keuangan internasional utama seperti IMF dan World Bank menjadi agenda rencana reformasi. Sesuai komunikasi, perubahan kuota dan *voting power* di IMF direncanakan akan dikaji ulang pada Januari 2011, sementara pemilihan staf institusi terkait untuk ke era yang akan datang akan mengedepankan faktor profesionalisme dan kapabilitas personal, ketimbang faktor politis.

Lima prinsip di atas pada dasarnya saling berkaitan, dan memperkuat posisi masing-masing dalam tujuannya mencapai pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global. Contohnya, prinsip transparansi yang berkaitan erat dengan penguatan kerja sama keuangan internasional. Kedua prinsip ini sama-sama memuat tentang *exchange shared policy* di mana IMF kemudian membantu negara dalam hal laporan perkembangan ekonomi nasional dan regional. Contoh lain seperti prinsip memperkuat regulasi keuangan yang komprehensif dan kaitannya dengan prinsip integritas dan kerja sama internasional. Semuanya dilakukan secara

multilateral yang kemudian melibatkan peran negara G-20 dan IFI-IFI terkait (IMF, World Bank, FSB, dan lain-lain).

**Gambar 18**  
**Model kerja sama G-20 dan Variabel Makroekonomi sebagai Indikator Keberhasilan Kerja sama**



Keterangan:

→ Garis proses

..... Garis level

- ① Level I: *Basic causal variables*
- ② Level II: *Regime as intervening variable*
- ③ Level III: *Related behavior and outcomes*

Pertama-tama, model ini terbagi atas tiga struktur / level utama, yaitu level pertama sebagai *basic causal variables*, level kedua sebagai *regime as intervening variable*, dan level ketiga sebagai *related behavior and outcomes*.

Pada level pertama, seperti yang telah dipaparkan secara mendetil pada bab II, kondisi sistem moneter internasional khususnya pascaBretton Woods masih memberikan ruang bagi ketidakstabilan perekonomian negara-negara, dalam hal ini termasuk ketidakstabilan pasar finansial. Ketika krisis finansial global memuncak pada tahun 2008, negara-negara dunia perekonomian utama yang tergabung dalam forum G-20 kemudian mengidentifikasi isu tersebut dan merumuskan langkah-langkah kebijakan global yang merespons krisis. Tiga komunike G-20 yang tercipta melalui tiga KTT G-20 pada periode 2008-2009 menjadi landasan dalam kerja sama penanganan krisis finansial global yang kemudian dilaksanakan dengan memanfaatkan *existing international regimes* dan *new regimes/new institutions*. Proses kerja sama dalam kerangka rezim itu relevan dengan lima aspek mendasar yang dikemukakan Krassner, antara lain:

1. *Egoistic self-interest*

Kerja sama G-20 dalam krisis finansial global melibatkan keterbatasan negara-negara maju (khususnya dalam hal kapital dan legitimasi). Biaya (*cost*) untuk mencari keuntungan sendiri (memanfaatkan proses kerja sama) masing-masing negara harus dibayar lebih besar ketimbang biaya mengembalikan pemulihan dan pertumbuhan perekonomian global yang dapat ditanggung bersama oleh negara-negara anggota G-20.

2. *Political power*

Negara-negara maju, yaitu AS dan kelompok G-7 menginisiasi kerja sama krisis melalui forum G-20. Dalam kerja sama ini, nilai-nilai seperti perdagangan bebas (*free trade*) dan liberalisasi finansial menjadi salah satu tujuan penguatan dalam agenda.

3. *Norms and Principles*

KTT G-20 merumuskan lima prinsip bersama, seperti yang telah dipaparkan pada bagian-bagian penelitian ini sebelumnya. Prinsip-prinsip tadi kemudian memengaruhi semua aktivitas dan kemunculan rezim-rezim/institusi baru dalam proses kerja samanya.

4. *Usage and Custom*

Rotasi Troika dalam G-20, contohnya, merupakan isu yang relevan dengan aspek ini. Troika G-20 berpengaruh terhadap fokus pembahasan dan program kerja G-20 selama satu tahun kursi ketua berjalan. Tendensi lain terlihat dari pertemuan informal para deputi G-20 yang berlangsung dua kali setahun, sama halnya seperti pertemuan deputi dalam IMF.

#### 5. *Knowledge*

Dalam kerja sama G-20 terhadap penanganan krisis finansial global terdapat praktik *shared policy*. Proses *sharing* kebijakan ekonomi nasional ini biasanya terjadi pada pertemuan tahunan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 yang kemudian menjadi sumber pengetahuan dan acuan bersama dalam kerja sama penanganan krisis finansial global. Semua laporan-laporan dari rezim internasional seperti IMF, FSB, World Bank, OECD, dan lain-lain juga menjadi sumber referensi dalam kerja sama ini.

Dari level pertama itu sekarang kita beranjak ke level kedua. Pada level kedua ini, komunique KTT G-20 menjadi landasan serta rekomendasi bagi kerja sama penanganan krisis finansial global. Di sini, rezim-rezim keuangan internasional kemudian menjadi kendaraan dalam mencapai empat tujuan yang telah disederhanakan tadi, yaitu agenda *free trade* (termasuk penolakan terhadap proteksionisme), pemulihan ekonomi global, regulasi sektor finansial, dan reformasi International Financial Institutions (IFIs). Sesuai dengan komunique G-20 dan implementasi konkretnya, IMF, FSB, World Bank, OECD, konvensi Basel, dan lain-lain merupakan beberapa rezim yang terlibat dalam kerja sama penanganan krisis.

Kedua level sebelumnya itu kemudian melahirkan level ketiga, atau level implementatif dan *related behavior*. Implementasi empat tujuan kerja sama terdistribusi dalam dua kendaraan besar, yakni pertemuan tahunan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang membahas *Action Plan* jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan kendaraan yang kedua adalah insitusi internasional sebagai perancang standar pada praktik lapangan, rezim regulasi, sekaligus sebagai pengawas (*monitoring function*) dari perkembangan program dan agenda yang ada. Kedua kendaraan ini bersifat saling mendukung di mana masing-masing pihak saling memberikan detail *Action Plan* dan laporan perkembangan agenda / program. Menteri keuangan dan gubernur bank sentral kemudian menerapkan program kerja dari pertemuan tersebut di negaranya masing-masing, sementara

institusi internasional berfungsi memonitor implementasi-implementasi yang ada dan/atau menyediakan proposal pembaharuan / revisi atas standar-standar praktik regulasi di tingkat global. Indikator keberhasilan kerja sama contohnya seperti tingkat inflasi global dan pertumbuhan GDP global selama periode kerja sama.

Pola level ketiga mencerminkan *related behavior* dan *outcomes* dari kerja sama negara-negara G-20 yang menggunakan rezim tersebut. Kerja sama yang bersifat *shared policy* dari semua negara G-20 itu kemudian berimplikasi global, dan akan dibawa kembali untuk dikaji ulang pada KTT G-20 yang berikutnya. Model kerja sama ini dapat diulang kembali pada periode-periode berikutnya hingga semua tujuan kerja sama telah benar-benar tercapai, dan dengan asumsi bahwa tiap organ kerja sama yang ada tidak mengalami perubahan mandat dan wewenang kekuasaan.

### 3.6. Tantangan-tantangan

Subbab yang singkat ini khusus ditujukan untuk mengkritisi model kerja sama G-20 tentang krisis finansial global. Pertama, dari segi komitmen negara-negara maju terhadap isu perubahan iklim. Komunike kedua dan ketiga menyiratkan urgensi terhadap pentingnya kerja sama perubahan iklim yang berhubungan tidak langsung dengan aktivitas ekonomi global, tapi komitmen negara maju terhadap konvensi perubahan iklim yang lebih mengikat masih diragukan. AS contohnya, hingga sekarang belum meratifikasi konvensi PBB tentang Perubahan Iklim. KTT perubahan iklim yang terakhir diselenggarakan di Copenhagen, Denmark juga gagal karena tidak berhasil membuat kesepakatan mengikat pada negara-negara maju setelah Protokol Kyoto, dan juga gagal dalam kesepakatan pengurangan CO<sub>2</sub>. Dari isu ini, penting untuk dikritisi akan selalu akan terjadi politisasi dan kontradiksi dalam isu-isu global – isu global belumlah ‘global’ seperti yang diusung dan ditandakan, bahkan dalam komunike G-20 jika berpotensi mengganggu *interests* negara-negara industri utara tersebut. Sementara di sisi yang lain, krisis finansial mutakhir yang utamanya berasal dari AS itu kemudian berkembang menjadi isu global, dan mendapat dukungan internasional melalui forum G-20. Di sini keadilan dan koordinasi Utara-Selatan masih perlu diuji lagi ke depannya mengingat salah satu semangat kerja sama G-20 yang tertuang dalam salah satu butir subbab komunike G-20 di London yang berbunyi, “*Ensuring a fair and sustainable recovery for all*”.

Kedua, masalah sistem moneter internasional itu sendiri. Meskipun kerja sama G-20 mencanangkan reformasi yang ambisius dan dalam kerangka multilateral elite baru, keefektifan hasil konsensusnya masih menghadapi ujian dan proses yang panjang, terutama terkait masih labilnya sistem moneter internasional pascaBretton Woods, dan khususnya konstelasi kebijakan ekonomi-politik negara-negara dunia. AS, contohnya enggan mendirikan atau menyetujui rezim finansial internasional baru, melainkan bertahan (dengan agenda reformasi) dengan rezim keuangan yang diciptakannya 60 tahun silam, IMF dan World Bank. Ini berarti bahwa, meski krisis finansial dan *moral hazard* menerjang AS dan dunia sejak dua tahun lalu US dollar masih menjadi mata uang utama dunia dalam waktu dekat ini. Bagaimanapun juga, unilateralisme AS masih cukup dominan dalam dinamika ekonomi-politik internasional kontemporer, ini terlihat dari masih besarnya pengaruh AS terhadap institusi-institusi dan rezim-rezim internasional di mana AS sanggup menyetir agenda utama dari tiap badan tersebut. Labilnya sistem moneter saat ini, membutuhkan gagasan baru tentang pemahaman yang mendalam dari semua pihak terkait, bukan kebijakan yang bersifat sementara semata.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> Paul Krugman, *op.cit.*, h. 191.